

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KIBA
(KAWASAN INDUSTRI BANTAENG) DALAM
MENINGKATKAN POTENSI LOKAL
KABUPATEN BANTAENG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

GENYA

4517021017

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA**

2021

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama : Genya
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa.
Pragram Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KIBA
(KAWASAN INDUSTRI BANTAENG) DALAM
MENINGKATKAN POTENSI LOKAL KAB. BANTAENG.**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik Sebagian maupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jum al Terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada peksaan tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 24 Agustus 2021

Penulis,


Genya

HALAMAN PENGESAHAN

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KIBA (KAWASAN
INDUSTRI BANTAENG) DALAM MENINGKATKAN POTENSI LOKAL
KABUPATEN BANTAENG**

GENYA

4517021017

Makassar, 24 Agustus 2021

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II



**Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.
NIDN.0915098603**



**Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc.
NIDN.0910128704**

Mengetahui,

Dekan FISIP

Universitas Bosowa



**Arief Wicaksono, S.IP., M.A.
NIDN.0927117602**

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



**Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.
NIDN.0915098603**

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu Dengan Judul Skripsi **EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KIBA (KAWASAN INDUSTRI BANTAENG) DALAM MENINGKATKAN POTENSI LOKAL KABUPATEN BANTAENG**

Nama : Genya
No. Stambuk : 4517021017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

Panitia Ujian

Ketua



Arief Wicaksono, S,IP., M.A.

Sekretaris



Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.

Tim Penguji Skripsi

1. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si.


(.....)

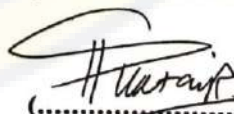
2. Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc.


(.....)

3. Dr. Drs. Syamsuddin Maldun, M.Pd.


(.....)

4. Drs. Natsir Tompo, M.Si.


(.....)

KATA PENGANTAR

Syalom...

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmatNya sehingga Skripsi yang berjudul “**Evaluasi Kebijakan Pembangunan KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) dalam Meningkatkan Potensi Lokal Kabupaten Bantaeng**” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan Ujian Skripsi pada program Studi Ilmu Administrasi Negara. Sebagai seorang manusia yang memiliki kemampuan yang terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang telah dialami dalam proses penyusunan hasil penelitian ini. Namun, berkat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dari keluarga serta kerabat, kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan mendedikasikan Skripsi ini kepada keluarga yang tersayang.

Terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, papa tercinta Pasau B dan mama tercinta Marthina Tudang Sondok dan juga kakak terkasih Piendry dan Pengriano yang tiada putus-putusnya mendoakan, memberikan motivasi dorongan dan kasih sayang kepada saya yang dimana sangat membantu saya dalam penyusunan hasil penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian, Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu selanjutnya penulis mengharapkan saran, gagasan, serta ide kritis demi tercapainya penyusunan yang lebih baik, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan menjadi perwujudan penulis hanya manusia biasa dengan berbagai segala kekurangan.

Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui penulisan proposal ini penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mendukung penulis antara lain, kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Arief Wicaksono, S.IP., M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
3. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si. selaku ketua prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
4. Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing 1 dan Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc. selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan Skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu penulis selama penyusunan Skripsi ini.
6. Orang tua penulis yakni Ayahanda Pasau dan Ibunda Marthina yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya selalu terucap, terimakasih atas didikannya, kasih sayang, yang membuat penulis selalu termotivasi dalam menyelesaikan Pendidikan.

7. Keluarga Besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Serta Keluarga Besar HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) yang telah memberikan bantuan, semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.
8. Teman-teman angkatan 17 ADM A kece dan team #Dirumahaja yang selalu mengingatkan saya dalam hal materi-materi penyusunan Hasil Skripsi dan lainnya.
9. Ucapan terima kasih kepada Teman Spesial saya **Steven Anriano T** yang telah menemani, memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
10. Kak Nitha Tricrahma dan Kak Yuspa Brianto yang banyak membantu selama penyusunan Skripsi.

Serta buat semua pihak yang telah membantu dan tidak sempat disebutkan namanya, penulis ucapkan terima kasih atas doa dan bantuannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktir dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 24 Agustus 2021

Genya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiiiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Batasan Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	11
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Teori	12
2.1.1 Konsep Kebijakan.....	12
2.1.2. Konsep Kebijakan Publik.....	14
2.1.3. Siklus Kebijakan Publik.....	16
2.1.4. Ciri-ciri Kebijakan Publik.....	18
2.2. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	19
2.2.1. Pengertian Evaluasi.....	19
2.2.2. Fungsi dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan	21
2.2.3. Permasalahan Dalam Evaluasi Kebijakan.....	25
2.3. Konsep Pembangunan	28
2.4. Konsep Industri	30
2.4.1. Definisi Kawasan Industri.....	30

2.4.2.	Macam-macam Industri	32
2.4.3.	Tujuan Pembangunan Kawasan Industri.....	33
2.5.	Potensi lokal	34
2.5.1.	Pengertian Potensi Lokal.....	34
2.5.2.	..Manfaat Kawasan Industri dalam meningkatkan Potensi Lokal Daerah	36
2.5.3.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Potensi Lokal Industri Daerah	40
2.6.	Penelitian Terdahulu.....	41
2.7.	Kerangka Konseptual	42
BAB III	METODE PENELITIAN	44
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.3	Sumber Data Penelitian	45
3.3.1	Data Primer	45
3.3.2	Data Sekunder	45
3.4	Informan penelitian	46
3.5	Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian.....	47
3.6	Teknik Pengumpulan Data	49
3.6.1.	Observasi	49
3.6.2	Dokumentasi	50
3.6.3	Wawancara.....	50
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	50
3.7.1	<i>Credibility</i> (Kredibilitas).....	50
3.7.2	<i>Transferability</i> (Transferabilitas).....	52
3.7.3	<i>Dependability</i> (Kebergantungan).....	52
3.7.4	<i>Confirmability</i> (Konfirmabilitas).....	52
3.8	Teknik Analisi Data.....	53
3.8.1.	Reduksi Data.....	53
3.8.2	Penyajian Data	53
3.8.3	Penarikan Kesimpulan	53
BAB IV	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.2.	Profil Kawasan Industri Bantaeng.....	62
4.2.1.	Gambaran Umum Kawasan Industri Bantaeng	62
4.3.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	64
4.3.1.	Pengembangan Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dalam Pemberdayakan Potensi Masyarakat Lokal di Kab. Bantaeng.	64
4.3.2.	Kondisi ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri di Kab. Bantaeng.	92
BAB V	PENUTUP.....	101
5.1.	Kesimpulan.....	101
5.2.	Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN- LAMPIRAN107



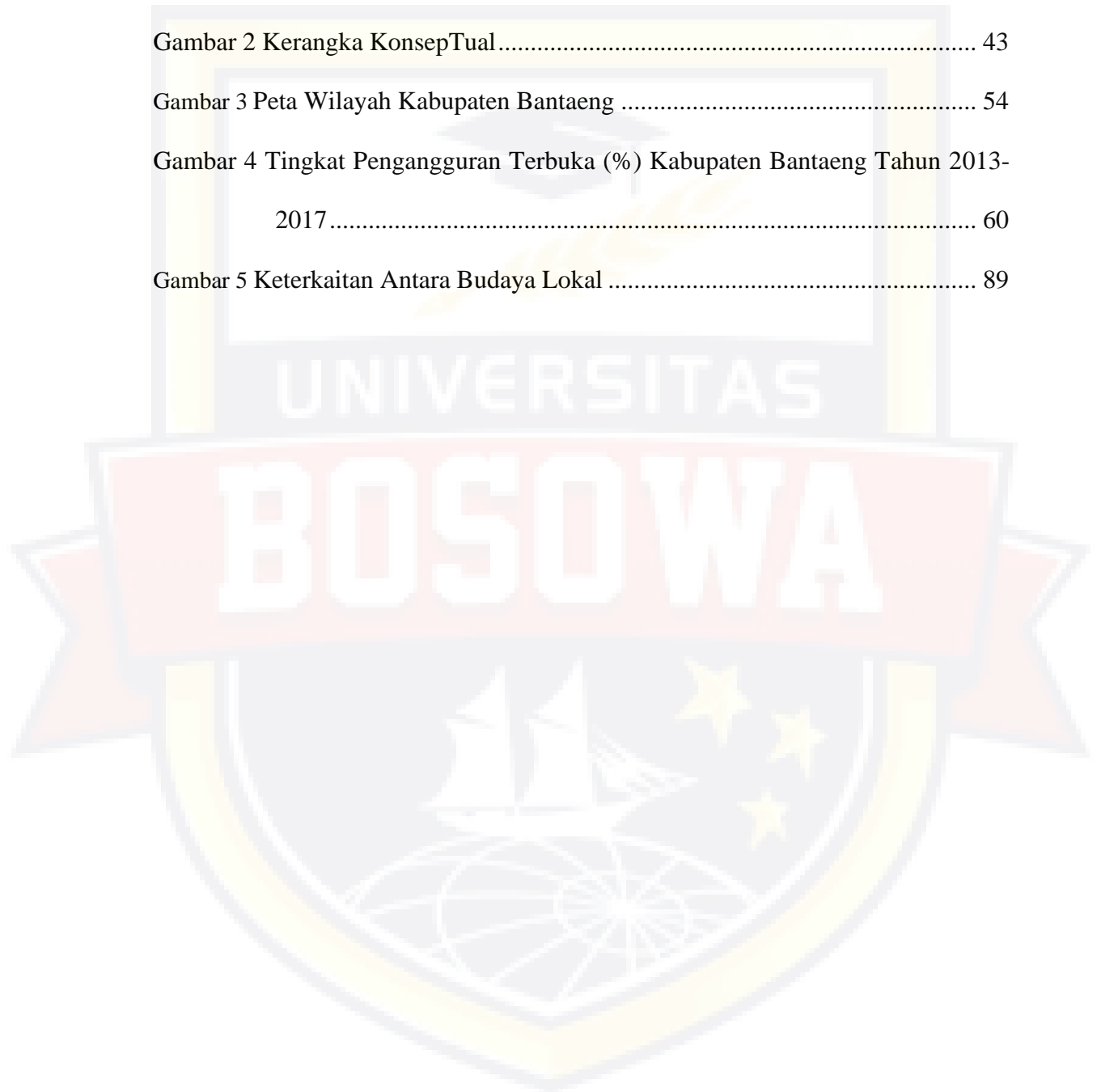
DAFTAR TABEL

Table 1 Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn	24
Table 2 Penelitian Terdahulu	41
Table 3 Informan Penelitian.....	46
Table 4 Luas Wilayah	57
Table 5 Capaian Target dan Ketenagakerjaan Tahun 2013-2017.....	60
Table 6 Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan yang Dilintasi Kabupaten Bantaeng Tahun 2017	63

UNIVERSITAS
BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Kebijakan Publik.....	17
Gambar 2 Kerangka KonsepTual.....	43
Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Bantaeng	54
Gambar 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013- 2017.....	60
Gambar 5 Keterkaitan Antara Budaya Lokal	89



DAFTAR IAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian	108
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	110
Lampiran 3 Panduan Observasi	111
Lampiran 4 Daftar Nama Informan.....	112
Lampiran 5 Struktur Organisasi	113
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian Dari Kampus.....	114
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.....	115
Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng	116
Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantaeng	117
Lampiran 10 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.....	118
Lampiran 11 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor PT Bantaeng Sinergi Cemerlang (PT PERSERODA)	119
Lampiran 12 Dokumen Wawancara dengan Informan	120

DAFTAR SINGKATAN



BLK	: Balai Latihan Kerja
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
KIMA	: Kawasan Industri Makassar
KIBA	: Kawasan Industri Bantaeng
PERDA	: Peraturan Daerah
PERSERODA	: Bantaeng Sinergi Cemerlang
PT	: Perseroan Terbatas
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RDTR	: Rencana Detail Tata Ruang
RPIK	: Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng
RIPIN	: Rencana Pembangunan Induk Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam

ABSTRAK

Genya, Evaluasi Kebijakan Pembangunn KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) dalam Meningkatkan Potensi Lokal Kab. Bantaeng. (dibimbing oleh Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si. dan Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc.).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan Pembangunan Kawasan Industri dalam memberdayakan masyarakat lokal Kabupaten Bantaeng.

Informan yang terdiri dari Bagian Kabid, Sekertaris, Staf Kantor, Direktur Perusahaan dan Manager Operational. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Focus penelitian ini merujuk pada Memberdayakan Potensi Lokal Masyarakat dengan program pembangunan Kawasan Industri Bantaeng. Data Penelitian diperoleh melalui hasil Observasi, Wawancara dan Dokumen-Dokumen.

Melalui hasil penelitian yang sudah dilakukan, nyatanya Pemerintah dalam mensosialisasikan Keberadaan Kebijakan Pengembangan Industri yang sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikerenakan peran pemerintah yang menjadi bagian dari pembangunan Kawasan Industri Bantaeng ini sudah dirasakan Sebagian masyarakat yang bekerja pada perusahaan tersebut. Bahkan tantangan-tantangan yang di alami oleh Pengelola Kawasan Industri dan Pemerintah daerah ini dapat di selesaikan dengan baik. Untuk itu selanjutnya dalam pembangunan Kawasan industri Jangka Panjang yang harus dilakukan Pemerintah Kab.

Kata Kunci: Kebijakan dan Meningkatkan Potensi Lokal

ABSTRACT

Genya, Evaluation of Policies for the Development of KIBA (Bantaeng Industrial Area) in Increasing the Local Potential of Kab. Bantaeng. (supervised by Nining Haslinda Zainal, S.Sos., M.Si. and Ade Ferry Afrisal., S.H., M.Sc.).

This study aims to evaluate the extent to which industrial estate development policies empower local communities in Bantaeng Regency.

Informants consisting of Head of Division, Secretary, Office Staff, Company Director and Operational Manager. This study used descriptive qualitative method. The focus of this research refers to Empowering Local Community Potential with the Bantaeng Industrial Estate development program. Research data obtained through the results of observations, interviews and documents.

Through the results of research that has been carried out, in fact the Government in disseminating the existence of an Industrial Development Policy that has been going well. This is because the role of the government, which is part of the development of the Bantaeng Industrial Estate, has been felt by some of the people who work for the company. Even the challenges experienced by Industrial Estate Managers and local governments can be resolved properly. For this reason, in the development of long-term industrial estates, the district government must do.

Keywords: Policy and Improving Local Potencial.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Industri merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan daerah. Seluruh negara meyakini bahwa industrialisasi diperlukan karena dapat menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang, dan kecepatan pembangunan ekonomi harus besar dan panjang, sehingga meningkatkan pendapatan per kapita setiap tahun.

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, industrialisasi juga tidak lepas dari upaya peningkatan kualitas energi manusia dan pengetahuan profesional untuk memaksimalkan penggunaan energi alam. Dalam "UU Perindustrian" tanggal 3 Maret 2014, segala bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan industri, yaitu mengolah bahan baku dan / atau menggunakan sumber daya industri untuk menciptakan benda yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih besar, termasuk jasa industri.

Terdapat 115 badan usaha milik negara yang terdaftar di Indonesia saja, meliputi kawasan pertanian, kehutanan dan perikanan, kawasan pertambangan dan penggalian, kawasan industri pengolahan, kelistrikan, gas alam, uap / air panas, dan kawasan dingin. Pengelolaan, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, serta aktivasi restorasi, kawasan konstruksi, kawasan perdagangan grosir dan eceran, perbaikan dan pemeliharaan mobil dan motor,

kawasan pengangkutan dan penyimpanan, kawasan akomodasi dan makanan dan minuman untuk informasi dan komunikasi, keuangan dan bidang kegiatan asuransi, bidang real estate, profesional, bidang kegiatan iptek. (Boby 2021)

Kawasan timur Indonesia merupakan kawasan sentral pengembangan kawasan industri saat ini, dan pengembangan kawasan industri nasional tidak lagi terkonsentrasi di kawasan barat. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kawasan industri baru yang menunjukkan perkembangan luar biasa dari kawasan industri di Sulawesi, Maluku dan Kalimantan. Penambahan kawasan industri diperuntukkan bagi investor, yang bisa digunakan untuk merelokasi pabrik dari luar, atau untuk investasi baru di Indonesia.

Konsep penyusunan rencana pengembangan kawasan industri mengacu pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan terkait dan menjadi dasar hukum rencana pengembangan kawasan industri. Beberapa istilah / istilah telah ditemukan dalam pengembangan kawasan industri, dan saat ini perlu dicapai kesepakatan dengan mengacu pada informasi regulasi yang ada, yaitu: Undang-Undang tentang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, Pasal 14:

- (1) Pemerintah dan / atau pemerintah daerah menggunakan zonasi industri untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sedikit memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah

- b. Pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional;
- c. Peningkatan daya saing industri keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah; dan
- d. Peningkatan nilai tambah sepanjang nilai rantai.

(3) Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri;
- b. Pengembangan kawasan peruntukan industri;
- c. Pembangunan kawasan industri; dan
- d. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Terdapat banyak kawasan industri yang tersebar di seluruh nusantara, salah satunya adalah Makassar yang juga merupakan kota metropolitan di Indonesia dan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar adalah kota terbesar keempat di Indonesia dan kota terbesar di Indonesia bagian timur. Sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, angkutan darat, laut atau udara, dan simpul pelayanan angkutan penumpang. Serta pusat pembelajaran dan pelayanan kesehatan. PT KIMA (Persero) merupakan salah satu contoh industrialisasi Kota Makassar, salah satu kawasan industri terbesar yaitu Kawasan Industri Makassar di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya.

PT KIMA adalah pengelola kawasan industri terkemuka di wilayah timur Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (RPJP)

yang dirumuskan oleh negara atau kebijakan pembangunan industri nasional yang dirumuskan melalui metode industri berbasis produktivitas daerah (wilayah) telah memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian nasional dan menciptakan kesejahteraan dan kemanfaatan untuk daerah setempat. kemakmuran. Komunitas dan dunia bisnis. Tentunya dari perspektif kebijakan pembangunan industri nasional, pembukaan industri baru diharapkan memiliki kebijakan baru. Pembukaan industri baru tidak lepas dari kebijakan pemerintah atau yang biasa disebut dengan kebijakan publik. (Agustino 2008) meyakini bahwa kebijakan publik ialah rangkaian tindakan / kegiatan yang diajukan oleh suatu kelompok atau pemerintah pada wilayah tertentu dengan hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (peluang), dimana kebijakan dapat diusulkan untuk membantu mengatasi hambatan tersebut / mencapai tujuan. Kebijakan publik mencakup semua yang dibutuhkan pemerintah, dan tidak akan mencoba atau tidak akan melakukannya. Selain itu, Anderson, 1979:3 mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dirumuskan atau dikembangkan oleh instansi dan pejabat pemerintah, Dari sudut pandang teoritis kebijakan pemerintah, itu adalah pembukaan industri baru, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan industri ini.

Hal ini terkait dengan keberadaan kawasan industri, oleh karena itu peran pemerintah sebagai promotor yang sangat strategis dalam upaya pencapaian pengembangan kawasan industri melalui kepemimpinan kelembagaan menjadi empat hal utama yaitu merencanakan kawasan atau

kawasan industri, mewujudkan atau mengembangkan fasilitas utama dan penunjang industri, mengeluarkan kebijakan industri, dan merumuskan langkah-langkah penegakan hukum. Kabupaten Bantaeng sendiri merupakan kawasan pengembangan industri dengan kemampuan lokal dan dukungan fisik yang memadai. Untuk mengembangkan industri ini di bidang ini perlu disediakan lahan yang cukup luas serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Pertumbuhan kegiatan industri ke depan harus diimbangi dengan tata kelola wilayah dan penegakan hukum, terutama dalam menjaga keseimbangan wilayah. Kabupaten Bantaeng memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam pengembangan pusat industri modern. Dalam lingkungan yang dinamis, manajer organisasi harus dituntut untuk mengatur suatu organisasi yang dapat meningkatkan efisiensi strategis dengan cara yang efektif, metode ini dapat meramalkan tren baru untuk mencapai dan mempertahankan posisi kompetitifnya. Strategi perumusan sendiri merupakan fungsi untuk pengambilan keputusan, yang menghubungkan area dimana organisasi dapat melakukan aktivitas, sumber daya yang akan dilayani dan tujuan yang ingin dicapai.

Salah satu fenomena di Kab. Bantaeng yaitu kondisi ekonomi yang masih menjadi kantong kemiskinan bagi masyarakat pada Tahun 2008 salah satunya di Kecamatan Pa'jukukang dimana kecamatan ini memiliki curah hujan yang rendah, tanah tidak subur sehingga pengelolaan sektor pertanian tidak berkembang dengan baik padahal dilihat dari berbagai kondisi ekonomi yang menjadi pendapatan besar masyarakat Kecamatan Pa'jukukang itu dari

sektor pertanian seperti tanaman buah-buahan, padi dan lainnya. Selain itu, karena pembangunan infrastruktur pariwisata yang berdampak signifikan terhadap pembangunan wilayah, Kabupaten Bantaeng merupakan wilayah yang kecil jika berpijak pada sektor pertanian, dan berorientasi pada pasar lokal tidak akan memberikan pertumbuhan yang memadai, maka dari itu dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Bantaeng ini bisa membuat perekonomian masyarakat Kab. Bantaeng khususnya di wilayah Kec. Pa'jukukang meningkat. Serta mengatasi beberapa permasalahan yang dialami masyarakat Kab. Bantaeng diantaranya yaitu kurangnya pengelolaan sumber daya alam, Kondisi ekonomi yang masih sangat kecil bagi masyarakat, serta banyaknya pengangguran di wilayah Kabupaten Bantaeng.

Dengan berkembangnya Kawasan Industri Bantaeng menjadi industri yang menjanjikan terutama bagi masyarakat yang membawa dampak ekonomi bagi daerah tersebut. Bantaeng diharapkan dapat menjadi pusat industri yang strategis untuk pembentukan pusat ekonomi baru, karena merupakan satu-satunya kawasan industri yang dekat dengan laut, sehingga proses distribusi impor dan ekspor lebih cepat dan efisien. Perkembangan Kabupaten Bantaeng yang luar biasa tidak hanya di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, namun juga di tingkat nasional. Selama Nurdin Abdullah menempati urutan pertama di Bantaeng, kerja kerasnya tidak lepas dari kerja keras Nurdin Abdullah. Perkembangan ekonomi Kabupaten Bantaeng sebesar 6,73 “Persen” pada tahun 2008, dan terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2013 yaitu mencapai 8,82 “Persen”. (A.Fajar Ferdiansyah et al. 2019)

Prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, oleh karena itu perlu didukung oleh pedoman kebijakan yang matang dan komprehensif tidak hanya permasalahan banjir yang dialami Kabupaten Bantaeng saat sebelum masa kepemimpinan Bupati Nurdin Abdullah ialah minimnya industri yang menyebabkan banyak pengangguran di Kabupaten ini. Kawasan industri pengolahan merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi besar yang dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi. Dalam menanggulangi kasus tersebut, Bupati Bantaeng menghasilkan terobosan baru berbentuk pembangunan Kawasan Industri Bantaeng, maka dari itu Penelitian terkait Evaluasi Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng ini sangat penting untuk di ketahui dari segi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah yang telah dibangun Kawasan Industri Bantaeng di wilayah Kecamatan Pa'jukukang tersebut, dan yang menjadi perbedaan dari penelitian lainya tidak jauh dari permasalahan tentang peningkatan pengembangan Strategis, dan Sumber Daya Manusia.

Pembangunan Kawasan industri merupakan mandat langsung dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 yang memerintahkan kepada kepala daerah untuk Menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun daerah dan mengkoordinasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Tentunya dalam pembangunan daerah, hal ini membutuhkan peningkatan pemanfaatan dan potensi daerah yang optimal.

Selain itu, Pemerintah Bupati Bantaeng mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bupati Bantaeng tahun 2012, yang mengacu pada kawasan industri besar dalam Pasal 39 ayat 2, dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018. Pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng. Tujuannya adalah untuk memastikan kenyamanan usaha dalam penggunaan lahan dan investasi jangka panjang, serta untuk mengendalikannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan wilayah, meningkatkan kegiatan pembangunan, dan memberikan partisipasi dan pembangunan untuk peluang dunia bisnis. Mempercepat laju pembangunan Kawasan Industri Bantaeng. Menurut peraturan atau regulasi (Tarigan 2005), hal ini berarti pemerintah telah memutuskan untuk hanya mengizinkan kegiatan untuk tujuan tertentu yang akan digunakan di sub-wilayah (wilayah) atau lokasi. Kawasan industri merupakan sarana untuk mengembangkan industri perlindungan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Secara umum pembentukan kawasan industri adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi, impor dan ekspor serta perdagangan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini juga merupakan katalisator untuk reformasi ekonomi.

Pembukaan Kawasan industri baru memiliki beberapa keunggulan selain lokasi yang strategis juga memiliki harga lahannya masih cukup terjangkau, dan memiliki fasilitas pengembangan SDM yang lengkap seperti sekolah Toyota Ehime dan Akademis Komunitas. Pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ditujukan untuk menjadi pusat ekonomi baru bagi Sulawesi

Selatan dan menjadi langkah pertama menjadikan Bantaeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan direalisasikan bersama. Adanya (KIBA) yang terintegrasi dengan (KIMA) akan menjadikan Bantaeng sebagai kawasan industri baru di Sulawesi Selatan, dimana Kawasan Industri Bantaeng ini merupakan salah satu Kawasan yang strategis di Sulawesi Selatan dan keberadaannya yang dekat dengan laut membuat Kawasan ini akan berpeluang terintegrasi dengan tol laut. Kawasan (KIBA) ini akan berpeluang untuk mempermudah proses ekspor dan barang impor barang dan kapal besar juga dapat sandar.

Mengembangkan kawasan industri baru untuk dikembangkan di daerah Bantaeng akan fokus pada pemanfaatan dan pengelolaan potensi lokal kemudian mengembangkan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, pembangunan Kawasan Industri Bantaeng siap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan berbagai potensi, Pembukaan kawasan industri mengutamakan potensi sumber daya manusia daerah tersebut. Oleh karena itu setiap daerah memiliki potensi lokalnya masing-masing sehingga pembangunan ini (KIBA) merupakan bagian dari sumber daya alam, budaya dan manusia daerah tersebut. Potensi alam suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, iklim dan lanskap daerah, Kondisi alam yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dan karakteristik potensi lokal masing-masing kawasan. Oleh karena itu, pengembangan potensi lokal suatu daerah harus memperhatikan tiga unsur yaitu kekhususan bentang alam, perilaku budaya

masyarakat setempat, dan kesejahteraan masyarakat yang membentuk segitiga yang saling berhubungan dan interaktif.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan keterbatasan peneliti, dari sekian banyak pertanyaan tentang potensi lokal yang dihadapi Kabupaten Bantaeng, Penelitian ini hanya berfokus pada: Bagaimana rencana Kebijakan pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk pengembangan kawasan industri dalam memberdayakan potensi masyarakat setempat.

Menanggapi Permasalahan diatas, penulis menyarankan untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pembangunan KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) dalam meningkatkan potensi lokal Kab. Bantaeng”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada diatas, maka muncul suatu pertanyaan penelitian yaitu:

- a. Apakah Kebijakan pengembangan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini dapat memberdayakan potensi masyarakat lokal di Kab. Bantaeng?
- b. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri di Kab. Bantaeng?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan arahan dalam pengumpulan data yang akan dilakukan. Berdasarkan rumusan pertanyaan diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pengembangan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dalam dalam memberdayakan potensi masyarakat lokal.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan kawasan industri Bantaeng.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memberi pemahaman terhadap proses pengembangan potensi lokal guna meningkatkan ekonomi masyarakat.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk masalah yang sama serta penelitian yang berhubungan pada pembahasan penelitian ini. Selain itu penelitian ini dapat memberikan masukan atau solusi mengenai pengembangan potensi lokal dan peningkatan ekonomi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1 Konsep Kebijakan

Istilah "kebijakan" mengacu pada seperangkat prinsip dan aturan fundamental untuk pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan tindakan. Penerapannya dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi, asosiasi, dan individu. Hukum tidak sama dengan kebijakan. Hukum dapat melarang dan memaksa tindakan tertentu, sedangkan kebijakan hanya memandu tindakan yang paling mungkin mencapai hasil yang diharapkan.

(Alam 2020) mengutip Carl J federick dan mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam lingkungan tertentu terdapat kesulitan dan peluang untuk melaksanakan kebijakan tersebut. tujuan tertentu.

Menurut kebijakan umum (Abidin 2014) dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. **Kebijakan umum**, yaitu kebijakan yang dapat dijadikan pedoman positif maupun negatif atau pedoman pelaksanaan, yang mencakup seluruh daerah atau instansi terkait
2. **Kebijakan pelaksanaan** yaitu kebijakan yang menggambarkan kebijakan umum. Seputar peraturan pemerintah pusat tentang pelaksanaan undang-undang

3. **Kebijakan teknis**, Kebijakan teknis, yaitu kebijakan bisnis dalam kebijakan implementasi.

(Alam, 2020:8-9) mengemukakan bahwa kebijakan adalah tujuan para aktor atau banyak aktor untuk menyelesaikan masalah, dan membagi kebijakan menjadi dua jenis: substantif dan prosedural.

Kebijakan substantif adalah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dan prosedur itu sendiri adalah pelaksana dan metode pelaksanaan kebijakan tersebut. Artinya kebijakan publik ialah kebijakan yang dirumuskan oleh instansi dan pejabat pemerintah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2014 menjelaskan bahwa kebijakan bersumber dari kata "bijak" yang artinya:

1. Selalu menjaga pikiran tetap jernih, lihai dan cerdas.
2. Percakapan cerdas, menggunakan dialek.

Untuk lebih menjelaskan definisi strategi sebagai berikut:

1. Kepandaian, keterampilan, kebijaksanaan.
2. Rangkaian konsep dan prinsip, konsep dan prinsip tersebut menjadi sumber dan dasar rencana pelaksanaan kerja, perilaku dan gaya kepemimpinan (terkait dengan pemerintah, organisasi dan lembaga lain), cita-cita, prinsip, tujuan atau sasaran, yang dapat digunakan sebagai manajemen untuk mencapai tujuan Panduan.

Menurut (Marbun 2007) dalam kamus politik, kebijakan adalah penataan konsep dan prinsip yang diuraikan atas dasar suatu rencana pelaksanaan kerja. Pimpinan suatu pemerintahan atau organisasi

mengungkapkan cita-cita, prinsip, tujuan, atau niat, pedoman untuk mencapai tujuan. kebijakan terdiri dari 5 unsur- unsur esensial, yaitu:

1. Tujuan (*goal*)
2. Proposal (Rencana)
3. Program
4. Keputusan
5. Efek

(Alam, 2020:10) mengutip Irfan Islamy yang mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dari keputusan, dan keputusan harus ditransformasikan ke dalam model yang berbeda, yaitu kearifan adalah kearifan. Konsep kebijakan memerlukan pertimbangan kebijakan lebih lanjut, termasuk aturan-aturan yang ada.

Kebijakan harus dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang sedikit banyak berkaitan dengan konsekuensi bagi orang-orang yang terlibat, bukan keputusan yang independen. Masyarakat beranggapan bahwa kebijakan akan dipahami sebagai arah atau modus kegiatan, bukan sekadar keputusan untuk melakukan sesuatu.

2.1.2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan yang dikemukakan oleh (Thomas R Dye 2016) dalam Agustino, 2014 menunjukkan bahwa kebijakan publik ialah apa yang dipilih atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Menggambarkan kebijakan publik sebagai tindakan/kegiatan (peluang) yang diberikan oleh seseorang, organisasi, atau pemerintah

dalam konteks tertentu dengan hambatan (kesulitan) dan peluang, seperti yang didefinisikan oleh (Agustino 2014). Kebijakan tersebut dianggap dapat membantu mengatasi hambatan tersebut dan mencapai hasil yang diharapkan.”

Kebijakan publik mencakup berbagai inisiatif pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sosial secara langsung atau melalui lembaga-lembaga yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah di sektor-sektor yang penting bagi kegiatan pemerintah dicirikan sebagai kebijakan publik (termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan). Setidaknya tiga komponen penting dari kebijakan publik selalu ada, yaitu tujuan yang luas, tujuan tertentu, dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Solichin Abdul Wahab, kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kebijakan publik terhadap tindakan atau tindakan yang telah direncanakan.
2. Kebijakan publik terdiri dari tindakan-tindakan yang saling terkait dan menyebabkan pejabat pemerintah melaksanakan tujuan tertentu.
3. Untuk kebijakan publik terkait yang dilaksanakan oleh pemerintah di bidang tertentu, tindakan khusus harus diambil setelah setiap kebijakan.

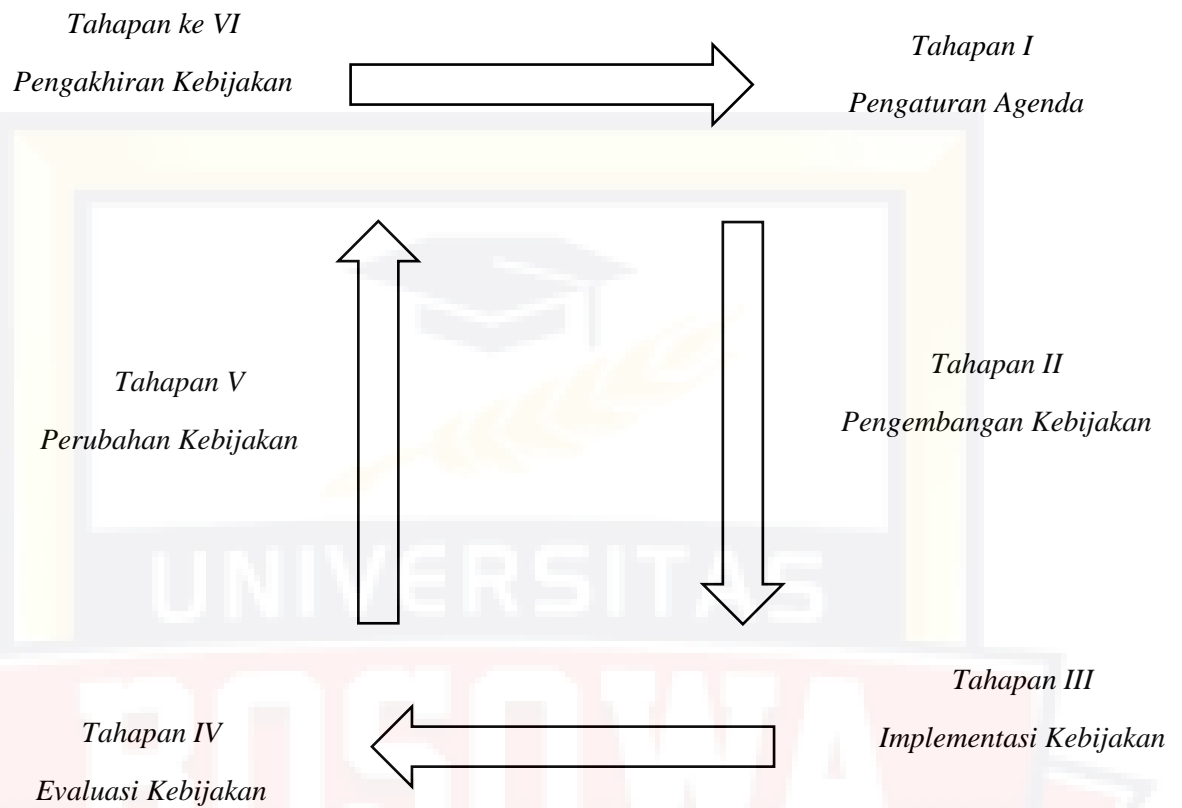
4. Kebijakan publik merupakan bentuk positif dan negatif. Kebijakan aktif meliputi tindakan pemerintah guna mempengaruhi suatu permasalahan, sedangkan bentuk negatif adalah kebijakan dimana pejabat pemerintah tidak melakukan tindakan atau tidak melakukan apapun dalam lingkup tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli di berbagai bidang di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang ditujukan pada tujuan tertentu yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah kepentingan umum. Jika kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh pemerintah, maka bersifat mengikat

2.1.3. Siklus Kebijakan Publik

Masalah publik yang sering terjadi adalah kunci pengambilan keputusan pemerintah saat merumuskan kebijakan. Permasalahan yang muncul disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan sarana pelaksanaan dengan ketersediaannya.

(Lester 2000) membagi enam Langkah Siklus Kebijakan Publik menjadi beberapa tahap, sebagai berikut:



Gambar 1 Siklus Kebijakan Publik

1. *Agenda Setting* (Pengaturan Agenda). Dengan kata lain, pengambil keputusan mengumpulkan masalah publik. Kemudian menganalisis hasil yang dikumpulkan dari masalah ini untuk digunakan dalam perumusan kebijakan.
2. *Policy Formulation* (Pengembangan Kebijakan), yaitu proses di mana pemerintah membuat pilihan kebijakan.
3. *Policy Implementation* (Implementasi Kebijakan), yaitu proses penerapan kebijakan untuk efek yang maksimal.
4. *Policy Evaluation* (Evaluasi Kebijakan), Proses pemantauan dan evaluasi hasil atau kinerja kebijakan.

5. *Policy Change* (Perubahan Kebijakan), Proses penyusunan perbaikan kebijakan.

6. *Policy Termination* (Pengakhiran Kebijakan), Proses mengakhiri kebijakan.

Berdasarkan penjelasan Lester dan Stewar tentang siklus kebijakan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan harus tepat dan tertib agar kebijakan yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan benar dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2.1.4. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki karakteristik khas yang berbeda dengan jenis kebijakan lain, di antaranya karakteristik yang melekat pada kebijakan publik bersifat khusus karena kebijakan tersebut akan dilaksanakan oleh kepentingan beberapa pihak. Ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik ini berawal dari rumusan kebijakan tersebut. Ciri-ciri tersebut yakni:

- a. Kebijakan publik ialah bukan tindakan atau tindakan spontan dan tidak disengaja, adalah tindakan yang mengarah pada suatu tujuan. Sistem politik modern mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang terencana
- b. Kebijakan pada dasarnya adalah tindakan yang saling berhubungan dan memerintahkan yang menyebabkan pejabat pemerintah melaksanakan tujuan tertentu, bukan keputusan independen;

kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mencakup bidang pengambilan keputusan hukum tertentu, tetapi diikuti oleh Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pelaksanaan dan eksekusi.

- c. Kebijakan berkaitan dengan perilaku nyata pemerintah di daerah tertentu.
- d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif atau negatif, yang dapat mencakup keputusan pejabat pemerintah untuk tidak mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan ketika diperlukan intervensi pemerintah.

2.2. Konsep Evaluasi Kebijakan

2.2.1. Pengertian Evaluasi

Pada umumnya kita menganggap bahwa evaluasi kebijakan adalah metode dalam kebijakan yang benar-benar ada atau telah diberlakukan. Sebenarnya tidak hanya itu. Evaluasi kebijakan menurut (Wollman 2007) meliputi:

Pertama, penelitian evaluasi, sebagai alat analisis, memerlukan penyelidikan rencana kebijakan untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan evaluasi kinerjanya (proses dan hasil); kedua, evaluasi adalah tahap siklus kebijakan, biasanya mengacu pada informasi yang dilaporkan ke keputusan, dan proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, menurut Lester & Stewart dalam (Abdal 2015), evaluasi kebijakan juga dapat mencoba mengevaluasi konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampaknya, dan mengevaluasi berhasil tidaknya suatu kebijakan sesuai dengan standar dan standar yang

ditetapkan, tetapi pada dasarnya ketika seseorang menginginkannya untuk melaksanakan evaluasi kebijakan, tiga hal yang harus dipertimbangkan:

- (i) Evaluasi kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi yang efektif tentang implementasi kebijakan. Dalam hal ini evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi alat-alat (bagaimana mengimplementasikan) kebijakan dan mengevaluasi hasil dari penggunaan alat-alat tersebut.
- (ii) Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai kesesuaian tujuan atau sasaran tertentu dengan isu-isu terkini. Dalam fungsi ini evaluasi kebijakan menitikberatkan pada esensi kebijakan publik yang ada. Asumsi dasar yang dimaksudkan yaitu merumuskan kebijakan publik untuk memberi penyelesaian permasalahan publik, oleh karena itu evaluasi harus menilai apakah tujuan yang ditentukan oleh kebijakan tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal yang biasa terjadi dalam praktek yakni bahwa tujuan telah tercapai, tetapi masalah tidak dapat diselesaikan.
- (iii) Upaya evaluasi kebijakan juga membantu kebijakan lain, terutama dari segi etimologi. Ini berarti mencoba mengevaluasi kebijakan untuk mendapatkan rekomendasi dari evaluasi kebijakan yang dievaluasi. Hasil studi evaluasi digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi peserta kebijakan lainnya. Oleh karena itu, banyak ahli yang meyakini bahwa fungsi kebijakan ini lebih produktif. Karena kritik tidak lagi menitikberatkan pada kekurangan

yang ada, tetapi mengarah pada rumusan pembelajaran agar kesalahan tidak terulang kembali dikemudian hari.

2.2.2. Fungsi dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan yang dijelaskan di atas akrab dengan pembuatan informasi tentang nilai atau manfaat hasil kebijakan. Jika solusi untuk masalah evaluasi berharga dan berguna, maka hasil ini akan membantu tujuan dan sasaran evaluator, terutama bagi pengguna lain. Dikatakan berharga dan bermanfaat karena dapat menyelesaikan evaluasi kebijakan dengan baik.

Menurut Dunn dalam Leo Agustino (1994: 405-406), evaluasi kebijakan memiliki tiga fungsi. Pertama, *evaluation provides reliable and valid information on policy performance to what extent needs, values and opportunities have been realized through public activities* (Dunn 1994: 405) atau evaluasi kebijakan harus memberikan informasi tentang implementasi kebijakan dalam bahasa lain. Efektif dan informasi terpercaya. Fungsi kebijakan menyediakan data dan informasi serta saran bagi pengambil keputusan untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, meningkatkan atau bahkan menghentikan implementasi kebijakan. Kinerja kebijakan yang dievaluasi dalam sampul evaluasi kebijakan:

- (i) Sejauh mana kebijakan telah memenuhi kebutuhan, nilai dan peluang melalui tindakan yang direncanakan. Dalam hal ini,

evaluasi kebijakan menerangkan sejauh mana tujuan tertentu telah tercapai.

(ii) Apakah tindakan yang diambil untuk melaksanakan tindakan darurat benar-benar efektif, responsif, bertanggung jawab dan adil. Hak asasi manusia perlu diperhatikan dalam melaksanakan kebijakan pada evaluasi kebijakan ini. Para penilai kebijakan perlu melakukan ini karena mereka tidak membiarkan sasaran dan tujuan kebijakan publik tercapai, tetapi justru melanggar penghidupan warga negara ketika diterapkan.

(iii) Apa dampak dari kebijakan itu sendiri? Pada bagian ini, penilai kebijakan harus mampu membedakan antara output dan hasil implementasi kebijakan. Visi yang tajam ini sangat dibutuhkan masyarakat dalam melihat hasil evaluasi kebijakan, karena salah satu fungsinya adalah memberi informasi yang efektif dan andal, yaitu perwujudan hak tahu warga negara.

Kedua, *evaluation contributes to clarification and criticism of the values that underlie goals and objectives* (Dunn 1994: 405) atau Evaluasi kebijakan membantu untuk memperjelas dan mengkritisi nilai-nilai yang menjadi dasar pemilihan tujuan dan indikator. Padahal, pemilihan tujuan pencapaian tujuan tidak didasarkan pada nilai kepentingan kelompok, kelompok, atau partai politik tertentu. Itu harus didasarkan pada nilai-nilai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya klarifikasi nilai dengan mendefinisikan dan menjalankan tujuan yang ingin dicapai.

Nilai dasar pengambil keputusan perlu dikritisi dengan menanyakan secara sistematis kesesuaian tujuan dan indikator yang terkait dengan masalah yang akan diselesaikan. Ketika mempertanyakan kesesuaian target, analisis kebijakan dapat memeriksa nilai alternatif yang telah dihitung dan menjadi dasar berbagai bentuk pengambil keputusan yang wajar.

Ketiga, *evaluation can contribute to the application of other policy analytic methods, including problem solving and recommendation* (Dunn 1994: 406) Evaluasi kebijakan juga dapat berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan. Melalui evaluasi kebutuhan untuk mendefinisikan kembali tujuan dan indikator, informasi tentang implementasi kebijakan yang tidak memadai yang dihasilkan dari evaluasi kebijakan dapat membantu merumuskan kembali isu-isu kebijakan. Dengan mengevaluasi kebutuhan aktual untuk mengganti alternatif yang ada dengan alternatif yang lebih baik, evaluasi strategis juga dapat berperan dalam memberikan kontribusi pada pembaruan atau revisi alternatif strategi publik.

Berdasarkan keadaan di atas, Dunn (1994) kemudian menjelaskan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk evaluasi kebijakan: Perbedaan utama antara kriteria evaluasi dan rekomendasi yang dilampirkan pada penerapan kriteria adalah bahwa kriteria tersebut diterapkan secara retrospektif. (Setelah fakta) tempat di mana standar yang diusulkan telah diterapkan (sebelum fakta).

Table 1 Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil telah mencapai efek yang diharapkan?
Efisiensi	Berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara merata di antara kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (target) yang diharapkan benar-benar berguna atau berharga?

Sumber Dunn (1994: 405)

Paparan Dunn segaris dengan pandangan Mark (2000: 17) yang menjelaskan ada empat fungsi evaluasi kebijakan: (1) Evaluasi manfaat dan harga, yaitu untuk memastikan pengembangan keputusan program tingkat individu dan masyarakat; (2) Klasifikasi, yaitu metode struktur utama yang digunakan untuk klasifikasi dan pengembangan atau penerapan sub-jenis klasifikasi prosedur penelitian; (3) Analisis kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menguji kausalitas atau melalui mekanisme pemeriksaan efek (4) survei nilai, yaitu metode yang digunakan untuk mengevaluasi proses, mengeksplorasi nilai-nilai yang muncul atau menggunakan Analisis formal dan kritis untuk membedah posisi nilai.

2.2.3. Permasalahan Dalam Evaluasi Kebijakan

Inti pokok dari ini adalah untuk mengukur sejumlah halangan atau rintangan yang mungkin menjadi masalah dalam melakukan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, dibawah ini akan dipaparkan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi kebijakan publik.

Pertama, Ketidakpastian arah dan tujuan kebijakan, jika arah kebijakan tidak jelas, kontradiktif, atau menyimpang, maka dalam penentuan kelanjutan yang hendak dicapai akan menjadi sulit dan membuat frustrasi. Misalnya, Program Pengembangan Kota. Tujuan program ini adalah memperbaiki kehidupan masyarakat di perkotaan yang meliputi banyak aspek seperti pembangunan kembali daerah kumuh, perbaikan rumah, kesempatan memperoleh, pendapatan dan kebudayaan, pengurangan tindak kriminal dan kejahatan, pengurangan ketergantungan pada pemerintah, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, dan perawatan gedung bersejarah. Merujuk pada tujuan program ini, maka disimpulkan bahwa sama sekali tidak ada prioritas ditunjukkan pada macam-macam aspek.

Kedua, Hubungan sebab akibat (*Causality*), evaluasi sistematis harus mampu menjelaskan perubahan kondisi dunia nyata yang disebabkan oleh keputusan kebijakan. Tetapi dengan adanya kenyataan bahwa kegiatan A dilaksanakan dan kondisi B dikembangkan bukan berarti bahwa adanya hubungan sebab akibat. Sesuatu dapat terjadi

dengan atau tanpa kebijakan. Untuk menggambarkan lebih jauh dengan mengenai hubungan sebab akibat ini, maka kasus kebijakan pengendalian kriminal dapat dijadikan contoh. Tujuan kebijakan ini adalah penanggulangan tindak kriminal dengan cara pengendalian. Penanggulangan disini dapat didefinisikan sebagai pencegahan ataupun pengendalian dari tindakan yang dapat terjadi.

Ketiga, Dalam lingkup sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan dapat berupa dampak terhadap topik atau kelompok selain subjek atau kelompok sasaran. Rencana kesejahteraan tidak hanya akan berdampak pada orang miskin, tetapi juga mempengaruhi orang lain, seperti pembayar pajak, pejabat atau orang, dan orang berpenghasilan rendah yang tidak dapat menikmati manfaat dari program kesejahteraan. Dampaknya pada kelompok ini dapat berbentuk simbolik atau material. Para pembayar pajak dapat mengeluh bahwa sejumlah uang yang diperolehnya dengan susah payah akan dipakai untuk membantu orang-orang yang malas bekerja. Beberapa pekerja dengan pendapatan rendah dapat merencanakan kembali untuk memakai 'tunjangan kesejahteraan' daripada melanjutkan bekerja ditempat yang memberinya upah rendah. Dampak dari suatu kebijakan atau program bisa jadi menyebar. Dampak inilah yang menjadi masalah dalam evaluasi kebijakan.

Keempat, Kesulitan dalam memperoleh data. Untuk evaluator kebijakan, kurangnya data dan informasi lain yang relevan dan akurat dapat menjadi masalah. Model ekonometrik dapat mempekirakan

dampak pajak yang diambil dari kegiatan perekonomian, tetapi data yang sesuai untuk mengukur dampak ekonomi yang sesungguhnya sangat sulit dicapai. karena banyakna dampak program sosial dan ekonomi, pertanyaan seperti, “apakah seseorang yang menerima program akan lebih baik bila dibandingkan dengan yang tidak?” Menjawab hal ini tidaklah mudah. Kesulitan data untuk menjawab pertanyaan tersebut kerap menjadi kendala utama apalagi jika pertanyaan itu diperlebar dengan membandingkan program-program yang diperuntukkan pada kelompok-kelompok tertentu.

Kelima, Penolakan Pejabat Berwenang (*Official Resistance*). Jika "hasil" tidak memenuhi standar mereka, pihak pejabat berwenang akan menolak. Akibatnya, pejabat dapat meremehkan atau menilai terlalu kecil evaluasi kebijakan, menolak memberikan akses data kepada para penilai, memperlambat pekerjaan, atau menolak mengeluarkan kebijakan baru untuk perbaikan. Mengenai *Official Resistance*, evaluasi menjadi jauh lebih baik bila turut didukung atau dikontrol oleh pejabat yang lebih tinggi, yang harus membuat keputusan mengenai pemanfaatan evaluasi yang telah dilaksanakan. Antisipasi ini penting karena organisasi cenderung menentang perubahan sementara evaluasi justru memberikan tawaran perubahan.

2.3. Konsep Pembangunan

Pengembangan adalah proses yang lebih baik dari sebelumnya.

Menurut Insuutullah dalam (Nasution 2007), pembangunan ialah pergeseran ke model sosial yang memungkinkan realisasi nilai-nilai kemanusiaan yang lebih baik, memudahkan masyarakat untuk lebih mengontrol tujuan lingkungan dan politiknya, dan memungkinkan warganya untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas diri Anda sendiri.

Sementara (Effendi, 2002:9) mendefinisikan pembangunan sebagai proses yang berkesinambungan, bertahap dan dilaksanakan sesuai rencana, bertujuan untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, dan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk eksternal dan eksternal, Intern.

Pembangunan bukan hanya fenomena material, tetapi pada akhirnya harus melampaui aspek material dan ekonomi kehidupan manusia. (Todaro, 2002:20) meyakini bahwa pembangunan ialah proses multi dimensi, melingkupi perubahan struktur sosial, sikap sosial, perubahan kelembagaan negara, serta proses pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan.

Wirotomo mendukung pandangan ini dalam (Pahmi, 2010:8), ia percaya bahwa di dunia, pembangunan hanya akan memberi pertumbuhan material, sehingga tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup, tidak memahami kebajikan, akibatnya ada milyaran orang yang miskin. Hal ini sering ditetapkan oleh pemimpin, yang tidak mendengarkan keinginan

dari tingkat yang lebih rendah dan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dalam kaitan ini, (David Korten, 1993:7) menegaskan bahwa pembangunan sebenarnya telah menjerumuskan dunia ke dalam tiga krisis besar, yaitu kemiskinan, kekerasan, dan perusakan lingkungan.

Menanggapi pendapat negatif tentang pembangunan, (Adri, 2005:61) menggambarkan konsep dan prinsip pembangunan berikut:

1. Pembangunan haruslah sebuah proses, artinya setiap pekerjaan pembangunan mutlak membutuhkan kesinambungan pelaksanaan, meskipun pelaksanaan rencana dapat didasarkan pada prioritas dan tahapan tertentu, tidak ada tenggat waktu.
2. Pembangunan harus merupakan usaha yang disengaja, yang berarti bahwa setiap usaha pembangunan harus didasarkan pada motivasi dasar, maksud dan tujuan yang jelas dan logis, dan tidak hanya pada ide-ide emosional. Itu harus dikembangkan secara teratur, yang berarti harus direncanakan dan diarahkan untuk pengembangan dan perubahan.
3. Baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, pembangunan harus mendorong modernisasi dengan cara ini, yang artinya harus membawa perubahan dan hasil bagi masyarakat yang lebih luas, yaitu gaya hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera dari pada dunia. Situasi sebelumnya, termasuk potensi pengembangan masa depan dan prospek sumber mata pencaharian.

4. Hakikat dan ciri modernisasi yang ingin diwujudkan harus multidimensi, artinya harus mencakup seluruh aspek kehidupan.

Akhirnya, harus disadari bahwa semua konten yang disebutkan di atas ditentukan berdasarkan rencana sebelumnya, yang bertujuan untuk memajukan upaya nasional, negara, dan sosial pada umumnya.

(Harun, 2011:294) berpendapat bahwa pembangunan desa merupakan rencana yang komprehensif untuk memperoleh atau meningkatkan masyarakat pedesaan. Ia melanjutkan, bahwa pembangunan pedesaan merupakan strategi untuk meningkatkan taraf hidup sosial dan ekonomi di wilayah tertentu (dalam hal ini masyarakat pedesaan yang miskin).

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan proses pertumbuhan atau perubahan seluruh aspek kehidupan kearah yang lebih baik yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat.

2.4. Konsep Industri

2.4.1. Definisi Kawasan Industri

Menurut Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 (Keppres), Kawasan Industri adalah lokasi pemusatan kegiatan industri dan dilengkapi dengan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dipelihara oleh suatu usaha Kawasan Industri yang saat ini telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri..

Menurut peraturan Komisi Zonasi Industri Nasional tahun 1967, kawasan industri atau kawasan industri atau biasa disebut kawasan industri adalah kawasan industri yang terletak di atas lahan yang cukup luas yang tunduk pada penguasaan administratif oleh perseorangan atau organisasi. Karena letak, topografi, dan Zonasi yang sesuai, ketersediaan semua infrastruktur (utilitas) dan transportasi yang nyaman membuatnya sangat cocok untuk kegiatan industri.

Menurut "Industrial Development Handbook" (1975) dari ULI (Urban Land Institute) di Washington, D.C., zona industri adalah kawasan di mana kegiatan industri sangat mendominasi. Secara umum, kawasan industri memiliki kombinasi fasilitas yang meliputi pabrik, laboratorium R&D, gedung perkantoran, bank, dan infrastruktur lainnya (seperti fasilitas umum dan sosial, termasuk perkantoran, rumah, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka, dll).

Menurut Marsudi Djojodipuro, kawasan industri adalah sebidang tanah yang membentang beberapa ratus hektar dan dibagi menjadi beberapa kawasan berdasarkan kebutuhan pemilik usaha. Kawasan tersebut memiliki jalan yang menghubungkan saluran pembuangan dan gardu induk, serta jalan yang cukup lebar untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha yang akan berada di lokasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu kawasan dapat dikatakan kawasan industri apabila memiliki area, sarana dan prasarana, badan pengelola (manajemen), izin kawasan industri, serta manufaktur.

2.4.2. Macam-macam Industri

Pengelompokan industry di Indonsesia dapat dikatergorikan dalam beberapa sudut pandang. Menurut **Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2006 (DP)**, industry di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Industri dasar, seperti industri logam dasar dan mekanik (IMLD) dan industri kimia dasar (BCI) (IKD). IMLD berisi item berikut: mesin pertanian industri, produk listrik, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, baja, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Sementara itu, DFI meliputi: Industri pengolahan pestisida dan karet alam, industri pupuk dan semen, industri batubara dan silikat, dan sebagainya.
- b. Industri kecil, yang terdiri dari usaha makanan (makanan, minuman, dan tembakau), industri pakaian jadi dan kulit (tekstil, pakaian jadi, dan barang dari kulit), industri kimia, dan industri bahan bangunan (industri kertas, percetakan), penerbitan, karet, produk plastik, dan lain-lain), pertambangan dan industri bukan logam (sepeda motor, peralatan ilmiah, komoditas logam, dll).

- c. Industri hilir, kelompok Miscellaneous Industries (AI), meliputi: industri yang mengelola sumber daya hutan, industri yang mengelola hasil tambang, industri yang mengelola sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain.

Selain itu, diklasifikasikan ke dalam jenis berikut sesuai dengan jumlah pekerja yang digunakan:

- 1) Ada 1-4 pekerja di industri rumah tangga.
- 2) Jumlah pekerja di industri kecil 5-19 orang.
- 3) Industri menengah, jumlah pekerja 20-99.
- 4) Industri besar dengan 100 atau lebih karyawan

2.4.3. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1996 secara jelas mengatur tujuan pengembangan kawasan industri Indonesia Pasal 2:

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di wilayah tersebut.
- b. Memfasilitasi kegiatan industri
- c. Mendorong berdirinya kegiatan industri di kawasan industri
- d. Mengintensifkan pengembangan industri yang berwawasan lingkungan

Sementara itu, Menurut Kelompok Koordinasi Kawasan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, tujuan utama pembangunan dan pengembangan kawasan industri adalah untuk memudahkan investor industri memperoleh lahan industri selama pengembangan industri.

2.5. Potensi lokal

2.5.1. Pengertian Potensi Lokal

Potensi kata berasal dari kata bahasa Inggris potent, yang artinya keras atau kuat. Dalam pengertian lain, istilah "potensi" berarti kekuatan, kemampuan dan kekuatan, yang mungkin belum atau belum direalisasikan, tetapi belum mencapai kondisi terbaiknya. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia potensi berarti kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi adalah kekuatan yang dimiliki manusia. Namun pemanfaatan kemampuan tersebut belum dilakukan secara optimal. Oleh sebab itu, hal yang perlu dilakukan manusia potensial selanjutnya adalah bagaimana memanfaatkan potensi tersebut untuk mencapai kesuksesan. Secara umum, mereka dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Kemampuan dasar, seperti kecerdasan, abstraksi, logika, dan pemahaman.
- b. Sikap kerja, seperti ketekunan, ketelitian, kecepatan kerja, dan kemampuan menahan stres.
- c. Kepribadian adalah model komprehensif dari semua kemampuan, perilaku dan kebiasaan manusia, baik fisik, mental, emosional atau sosial, semuanya diatur dengan cara yang unik di bawah pengaruh eksternal. Model ini memanifestasikan dirinya sebagai upaya untuk menjadi wujud manusia yang berperilaku sesuai dengan

keinginannya sendiri. Beberapa contoh kepribadian antara lain tulus, ikhlas, lincah, cerdas, dll.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa potensi yaitu kemampuan atau kekuatan yang ada dalam diri manusia yang dapat menghasilkan hal-hal yang sangat bernilai, akan tetapi manusia belum menggunakan kekuatan tersebut, sehingga tidak dapat memberikan hal-hal yang bernilai, sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan dalam Cara-cara berikut: Potensi wisata, potensi daerah dan potensi daerah.

Sumber daya alam, budaya, dan manusia suatu daerah disebut sebagai potensi lokal. Potensi alam suatu daerah ditentukan oleh kondisi geologi, iklim, dan bentang alamnya. Karena kondisi alamnya yang beragam, maka kapasitas listrik daerah masing-masing daerah berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri. Keunikan bentang alam, tindakan dan budaya masyarakat setempat, serta kesejahteraan masyarakat menciptakan segitiga yang terintegrasi dan kolaboratif. Konsekuensinya, ketiga faktor tersebut harus dibenahi dalam pertumbuhan dan perluasan kapasitas lokal suatu daerah.

Yang dimaksud dengan potensi lokal adalah sumber / tenaga dalam sejumlah kegiatan yang akan digunakan setiap daerah tertentu. Potensi lokal tidak lepas dari konsep masukan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Diharapkan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, masyarakat menjadi lebih akrab, sehingga dapat

meningkatkan dorongan untuk meningkatkan berbagai program pembelajaran.

Pada hakikatnya potensi lokal merupakan sumber daya yang ada di suatu daerah tertentu. Potensi lokal dikembangkan dari tradisi kearifan masyarakat yang rendah hati sebagai bagian dari budayanya. Menurut Victorino, ciri-ciri potensi lokal secara umum adalah:

- a. Berada di lingkungan social.
- b. Masyarakat memiliki rasa memiliki
- c. Berintegrasi dengan alam
- d. Memiliki sifat universal
- e. Bersifat praktis
- f. Menggunakan Bahasa yang mudah dipahami
- g. Merupakan warisan turun menurun

2.5.2. Manfaat Kawasan Industri dalam meningkatkan Potensi Lokal Daerah

a. Menciptakan Pusat Pertumbuhan Industri

Dalam teori (Perroux 1970) yang terkenal adalah Istila yang berpusat pada pembangunan industri, gagasan ini menjadi landasan bagi kebijakan pengembangan industri regional yang banyak diterapkan di banyak negara saat ini. Menurut Perroux, berbagai tempat tidak akan berkembang dengan kecepatan yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa daerah dengan intensitas yang

bervariasi yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan. Berikut ini adalah inti dari teori Perroux:

1. Industri unggulan (L'industrie matrice) akan berkembang selama proses pembangunan, yang akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah. Pertumbuhan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang terkait erat dengan industri unggulan tersebut karena keterkaitannya dengan antar industri.
2. Konsentrasi industri suatu wilayah akan melajukan pertumbuhan ekonomi, karena kesadaran industri akan menghasilkan pola konsumsi yang berbeda-beda di seluruh wilayah, maka pertumbuhan industri akan tercermin dalam pertumbuhan wilayah tersebut.
3. Perekonomian terdiri dari sistem industri aktif (industri unggulan) dan pasif (industri unggulan) (yaitu industri yang mengandalkan industri unggulan atau pusat pertumbuhan). Area yang relatif berkembang atau aktif dapat berdampak pada area lain yang sedang berkembang atau pasif.

Selain itu, kata Perroux, sejauh menyangkut lokasinya, perkembangan ekonomi daerah tidak merata, dan pusat-pusat pertumbuhan cenderung teraglomerasi (terkonsentrasi). Pada gilirannya, pusat-pusat pertumbuhan ini akan berpengaruh pada wilayah-wilayah yang lambat dalam berkembang.

Terdapat manfaat tertentu dari adanya aglomerasi industri yaitu manfaat skala ekonomi (jumlah usaha yang besar) dan manfaat dalam menghemat biaya. Penjelasan mengenai beberapa manfaat aglomerasi industri tersebut, antara lain:

a) Keuntungan internal perusahaan.

Keunggulan ini muncul oleh adanya keterbatasan faktor produksi yang hanya bisa didapatkan dalam jumlah tertentu kalau digunakan secara ekstensif. Dibandingkan dengan penggunaan batch kecil, biaya produksi per unit akan lebih rendah.

b) Keuntungan lokalisasi (*localization economies*)

Keunggulan ini terkait dengan sumber bahan baku atau fasilitas pengadaan. Ini menunjukkan bahwa, dalam kasus konsentrasi industri, satu industri adalah produk atau pasar dari yang lain.

c) Keuntungan Eksteren (keuntungan urbanisasi)

Artinya aglomerasi beberapa industri dalam satu wilayah akan menghasilkan penyediaan tenaga kerja dalam jumlah besar tanpa perlu pelatihan khusus untuk tugas-tugas tertentu, dan akan lebih mudah menarik orang-orang berbakat untuk menjadi manajer. Selain itu, cluster ini akan mendorong terbentuknya perusahaan pengabdian masyarakat yang sangat dibutuhkan industri, seperti listrik, air minum, dan perbankan skala besar. Karena perusahaan ini besar, mereka dapat mengurangi biaya.

Selain keunggulan skala ekonomi, aglomerasi memiliki keunggulan lain yaitu mengurangi biaya transportasi, Perkembangan industri suatu wilayah akan menunjang terbentuknya perusahaan jasa transportasi dengan skala fasilitas tertentu. Dengan fasilitas ini, industri tidak perlu menyediakan atau mengoperasikan jasa transportasi sendiri. Bahkan jika jasa transportasinya sangat mahal.

Suatu daerah yang bisa dikembangkan, dimana akan banyak pabrik dan gudang. Meningkatnya jumlah pabrik yang berdiri di suatu kawasan industri dapat mendorong terjadinya aglomerasi industri di kawasan tersebut. Efek positif dari aglomerasi ini adalah pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan rakyat.

b. Menciptakan keterkaitan antar Industri

Albert O. Hirschman mengemukakan bahwa pesatnya perkembangan satu atau beberapa industri telah mendukung peningkatan industri lain yang berkaitan dengan pertumbuhan sektor industri sebelumnya. Jika perkembangan tersebut (misalnya, industri tekstil mengarah ke produksi kapas atau pewarna yang tersedia untuk industri tekstil), hubungan ini dapat menjadi mata rantai ke belakang. Koneksi ini juga bisa menjadi forward connection. Misalnya jika industri TPT dalam negeri mendorong pertumbuhan investasi di industri apparel seperti.

Kehadiran kawasan industri yang menampung beragam industri, akan memikat investor untuk menempatkan pabrik di daerah dimana kawasan industri berada, terutama di dalam kawasan industri. Salah satu alasan daya tarik ini adalah bahwa industri yang ada memiliki keterkaitan dengan industri baru, seperti hubungan bahan baku, sebagai pemasok, boleh menggunakan mesin-mesin produksi secara bersama-sama untuk menghemat investasi, bahkan untuk perusahaan asing, bisa berbentuk keterkaitan karena negara asal, dan sebagainya.

2.5.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Potensi Lokal Industri Daerah

Taufik, sebagaimana dikutip oleh (Wiwandari 2014), menjelaskan bahwa modal, ketersediaan pabrik lokal dan sumber daya mentah, serta keberadaan tenaga kerja lokal, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi lokal. Kapasitas tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau hasil pabrik yang baik, yang selama ini belum menjadi prioritas pelaku ekonomi, harus diprioritaskan sebagai komponen lokal. Sebaliknya, dalam paradigma pembangunan global yang baru, kreativitas dipandang sebagai elemen penentu dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan dalam jangka panjang..

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa modal, tenaga kerja lokal, keberadaan pabrik dan bahan baku lokal menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi lokal industri daerah. Pekerja

masyarakat juga berpengaruh dalam menghasilkan bahan-bahan produk yang baik yang telah di kelola.

2.6. Penelitian Terdahulu

Table 2 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/TAHUN PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN PENELITIAN
1.	Syamsul Alam/2020	Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri (<i>Bantaeng Industrial Park</i>) Di Kabupaten Bantaeng.	Hasil Penelitian dan Pembahasan ada 4 Persyaratan titik permasalahannya: 1. Persyaratan Administrasi 2. Persyaratan Tehnis 3. Persyaratan Lingkungan 4. Persyaratan Finansial. Dari ke empat ini ditujukan untuk mengatasi problema-problema yang tengah di hadapi masyarakat karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahwasanya akan ada proses administrasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat tetapi itu semua tidak sesuai dengan perjanjian.
2.	A. Fajar Ferdiansyah/2019	Politik Pembangunan (Studi Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'Jukukkang Kabupaten Bantaeng.	Dengan adanya Kawasan Industri Bantaeng, terlihat jelas bahwa kesejahteraan Masyarakat Bantaeng telah meningkat secara signifikan. Diketahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng pada tahun 2008 sebesar 6,73 persen, menunjukkan peningkatan yang cukup besar.
3.	Lia Widya Listiawati/2020	Pengembangan Potensi Lokal Pertanian Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Home Industri Merk Jajan Japri di Pekon Prigsewu Provinsi Lampung)	Pengembangan Industri Rumah Tangga dengan Merek Barang Berbasis Potensi Pertanian Lokal Japri, Setelah bergabung dengan perusahaan industri rumah tangga yang dapat mengubah ekonomi keluarga dan membantu pasangan memenuhi kebutuhan sehari-hari, perekonomian masyarakat meningkat secara signifikan.

Sumber: Hasil Olah Data (2020)

2.7. Kerangka Konseptual

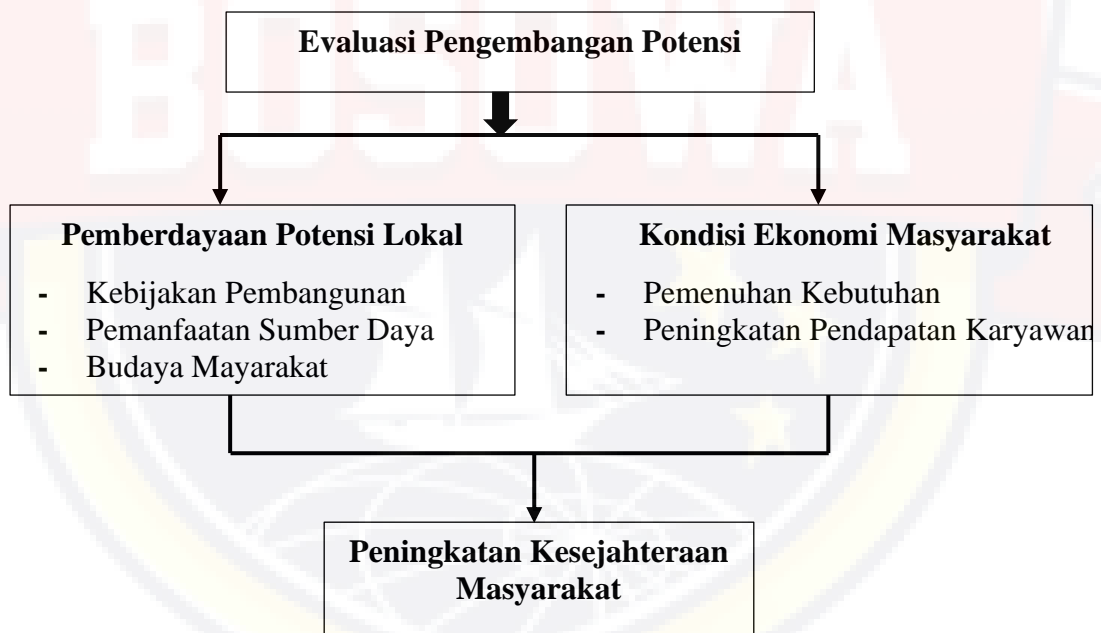
Kerangka penelitian dalam (Wollman 2007) pada umumnya menganggap bahwa Evaluasi Kebijakan yang benar-benar ada atau telah diberlakukan, sebagai alat analisis memerlukan menyelidiki rencana kebijakan untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan evaluasi kinerja (proses dan hasil). Oleh karena itu menurut (Lester 2000) evaluasi juga dapat mencoba mengevaluasi konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampaknya, dan mengevaluasi berhasil tidaknya suatu kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan yang diteliti berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, sesuai dengan kerangka di atas. Rumusan masalah menjadi pokok bahasan penelitian ini. Fokus kajian ini mungkin pada banyak isu besar yang perlu dibenahi dalam Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng, yaitu:

1. Memberdayakan Potensi Lokal Masyarakat dengan program pembangunan Kawasan Industri akan terwujudnya penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah, meningkatnya pemberdayaan manusia dalam pembangunan, serta meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi pada sector pertanian.
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Pengeluaran per kapita.

Mengetahui Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dalam memberdayakan masyarakat, serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat perekonomian masyarakat dan mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan perekonomian, untuk memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng.

Beberapa Pendapat yang telah dikemukakan pada teori-teori diatas, maka kerangka pikir penelitian akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun Tipe dan Jenis penelitian ini menggunakan;

1. Jenis Fenomologi Deskriptif

Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif fenomenologis yang menekankan pada objektivitas pengalaman hidup manusia.

2. Jenis Pendekatan Kualitatif

Jenis penelitian yang digunakan yakni Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diartikulasikan secara rinci melalui pengumpulan data. Menurut penelitian Bogdan dan Taylor (2004), teknik penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dapat memberikan data deskriptif berupa fakta tertulis atau lisan berdasarkan perilaku yang dapat diamati.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun Tipe dan Jenis penelitian ini menggunakan;

1. Jenis Fenomologi Deskriptif

Penulis akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif fenomenologis yang menekankan pada objektivitas pengalaman hidup manusia.

2. Jenis Pendekatan Kualitatif

Jenis penelitian yang digunakan yakni Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang diartikulasikan secara rinci melalui pengumpulan data. Menurut penelitian Bogdan dan Taylor (2004), teknik penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dapat memberikan data deskriptif berupa fakta tertulis atau lisan berdasarkan perilaku yang dapat diamati.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data tersebut. Menurut sumbernya dalam (Alam 2020), terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah yang dihadapi. Peneliti mengumpulkan data langsung dari lokasi dimana penelitian dilakukan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data utama. Sumber utama adalah informasi berupa dokumen, laporan dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti yang diubah dari data yang diperoleh sebelumnya. Arti dari data penelitian sekunder adalah sebagai berikut:

- 1) Studi Literatur adalah metode pengumpulan data yang dikumpulkan dari buku, bahan tertulis (jurnal), dan referensi permanen yang berhubungan langsung dengan studi.
- 2) Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan yang ada dilokasi dan sumber-sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.4 Informan penelitian

Konsep subjek menguasai masalah ditulis dalam (Alam 2020), memiliki data, dan benar memandu pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian. Pendekatan *snowball sampling* digunakan untuk menentukan informan, yaitu proses penentuan informan berdasarkan informan yang sebelumnya tanpa harus menetapkan jumlah yang sebenarnya dengan memperoleh informasi yang tepat tentang masalah penelitian yang diperlukan Penelitian ini cukup, dan memberikan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan.

Table 3 Informan Penelitian

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)			
No.	Nama Informan	Jabatan	Unit Kerja
1.	Amiruddin Nur, ST, MM.	Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam Infrastruktur Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian			
1.	Samsuri S.sos	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2.	Andi Lukman	Staf Tata Usaha Administrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Unsur Lain			
1.	Tony M. Pahlevi	Direktur Utama	PT Bantaeng Sinergi Cemerlang
2	Ansar S. E	Manager Operational	PT Bantaeng Sinergi Cemerlang
3	Muhammad Umar	Masyarakat	Karyawan PT Huadi Alloy
4	Nawir Syah	Masyarakat	Karyawan PT Yatai
5	Nur Fitri Rosita	Masyarakat	Karyawan PT Huadi Alloy

Berdasarkan Informan yang terdapat pada table diatas bahwa masyarakat yang di wawancarai adalah Karyawan yang bekerja pada perusahaan di Kawasan Industri Bantaeng. Karena salah satu program Pemerintah adanya pembangunan KIBA itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dari itu mayoritas yang diterima untuk bekerja pada perusahaan tersebut adalah masyarakat lokal Kab. Bantaeng.

3.5 Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian

Berdasarkan focus penelitian ini mengarah pada Peningkatan Potensi Lokal yang sebagaimana dijabarkan sebagai berikut;

- a) Peningkatan yang merujuk pada upaya menambah tingkat kemampuan seseorang, khususnya pencapaian dalam suatu proses keterampilan yang dikembangkan.
 1. Potensi lokal adalah kemampuan suatu desa, yang kemungkinan besar akan berkembang selamanya, jika tidak diolah atau diwujudkan dalam bentuk yang bermanfaat bagi masyarakat maka potensi tersebut akan menjadi potensi. Oleh karena itu, potensi daerah membutuhkan upaya yang tidak sedikit agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

2. Menurut kemampuan (Nurhayati 2017) kemampuan yang cenderung dikembangkan seperti power dan ability dapat lebih berkembang.

Potensi Istila tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga berdampak pada estetika lainnya, seperti potensi Istila daerah, potensi wisata, dll.

3. Menurut (Soleh 2017), permohonan desa setempat mempunyai kekuatan, kemampuan dan kemampuan desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa.

Potensi Lokal (Soetomo, 2014:118-119) mengidentifikasi paling tidak tiga hal yang harus diketahui yaitu;

1. Identifikasi kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat akan terus tumbuh seiring dengan perubahan dan inovasi sosial masyarakat. Kemampuan untuk mengenali kebutuhan mencerminkan kemampuan masyarakat untuk menyamakan realitas sekarang dengan realitas ideal sebagai harapan masyarakat.
2. Mengidentifikasi potensi, sumber daya, dan peluang yang terus berkembang. Potensi dan sumber daya saat ini akan tetap tersembunyi dan tidak dapat memenuhi permintaan jika tidak ada kegiatan ini Upaya identifikasi harus dilakukan sebagai sarana pengetahuan yang mengedepankan potensi lokal dan prinsip pemberdayaan masyarakat. Perlu dilakukan identifikasi untuk memperhatikan semua potensi dan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial. Tingkat kepentingan sumber daya sosial

sama pentingnya dengan sumber daya lainnya. Pengembangan masyarakat yang dilandasi oleh motivasi internal merupakan suatu proses perubahan yang bertumpu pada pertumbuhan energi internal dan potensi sumber daya yang ada.

3. Proses dan upaya menumbuhkan potensi dan sumber daya yang ada dengan cara yang lebih menguntungkan. Masyarakat dapat mengeksplorasi cara dan pengetahuan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia melalui proses pembelajaran sosial dan adaptasi terhadap lingkungan..

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga tehnik yang akan dilakukan dalam (Lia Widya Lis 2020) menuliskan bahwa pengumpulan data yaitu, Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara. Semua ini akan dimanfaatkan untuk melakukan penelitian pengembangan potensi lokal, sehingga setiap pendekatan dapat menjelaskan realitas pelaksanaan pengembangan potensi lokal di kawasan industri dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. (Kebijakan Pembangunan KIBA 'Kawasan Industri Bantaeng' dalam meningkatkan Potensi Lokal Kab. Bantaeng). Dijelaskan sebagai berikut;

3.6.1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang menitikberatkan pada gejala, kejadian, atau hal yang diteliti. Fungsi observasi ini untuk melengkapi atau memilah data yang belum diperoleh melalui wawancara. Dalam studi ini, jika diperlukan akan dicermati secara

langsung terkait kebijakan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng untuk meningkatkan potensi lokal.

3.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknologi yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada (seperti buku, gambar, kutipan, atau bahan referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian) tentang objek tersebut. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mencari atau memperoleh data yang jelas dan spesifik tentang pengembangan Kawasan Industri Bantan dalam rangka peningkatan potensi lokal.

3.6.3 Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dimana informasi diperoleh secara langsung atau lisan yang melibatkan komunikasi tatap muka antara dua atau lebih peneliti dan menggunakan pedoman wawancara untuk mendengarkan informasi secara langsung. (Kartono 1990)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan pada data penelitian kualitatif terdapat empat bagian yang di kemukakan oleh (Moleong, 2017:330) yaitu:

3.7.1 *Credibility* (Kredibilitas)

Kredibilitas dengan mana penelitian dilakukan memungkinkan untuk tingkat kepercayaan yang akan didirikan. Selanjutnya dilakukan

dengan pembuktian dengan fakta-fakta lain yang identik untuk menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap temuan penemuan tersebut.

a) **Triangulasi Sumber**, hal ini dilakukan dengan mengevaluasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data. Hal ini dilakukan untuk pengujian dan pengumpulan data dari berbagai wawancara, observasi, dan dokumen yang ada. Peneliti kemudian dapat membandingkan temuan dari masing-masing sumber observasi dengan temuan wawancara, serta temuan wawancara dengan catatan yang ada.

b) **Triangulasi Teknik**, hal ini dapat dicapai dengan membandingkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai pendekatan. Hasilnya, data yang diverifikasi dengan observasi dan dokumentasi. Jika ketiga prosedur pengujian data yang digunakan dapat memperoleh atau membuat data yang berbeda, maka peneliti akan melakukan pembicaraan lebih lanjut tentang sumber data terkait atau lainnya untuk menjamin bahwa data tersebut dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena ada sudut pandang yang beragam. -berbeda.

c) **Triangulasi Waktu**, Ini juga sering berdampak pada data. Pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan wawancara pada pagi hari, saat orang yang diwawancarai masih sangat segar, dapat menawarkan data yang valid dan dapat dipercaya. Dalam

skenario ini, pengujian data dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, atau pendekatan lain dalam berbagai setting atau periode. Jika data diperoleh pada saat hasil pengujian, itu harus dilakukan lagi sehingga data yang berbeda dapat ditemukan dengan percaya diri. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan meninjau temuan tim peneliti lain yang bertugas mengumpulkan data.

3.7.2 *Transferability* (Transferabilitas)

Transferabilitas ditentukan oleh ada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan ini, seorang peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kenyamanan konteks untuk menyediakan data yang lebih deskriptif.

3.7.3 *Dependability* (Kebergantungan)

Ketergantungan melakukan penelitian replikasi. Ketika dua atau lebih investigasi dilakukan di bawah kondisi yang sama dan hasilnya konsisten, ketergantungan tercapai.

3.7.4 *Confirmability* (Konfirmabilitas)

Konfirmabilitas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang objektif dapat dipercaya, bahwa data dapat dipastikan dengan menggunakan asumsi, paradigma, orientasi teoretis, sistem nilai, dan sudut pandang epistemologis.

3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Analisis data adalah proses yang terjadi setelah semua data terkumpul dari semua responden atau sumber data lainnya.. Dalam metode analisis data digunakan model (Miles, M.B 2014), yang diperkenalkan untuk menentukan waktu penelitian sebelumnya sebelum analisis data dan selama wawancara. Peneliti menganalisis jawaban responden yaitu:

3.8.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah metode pemilihan dan penentuan dengan memperhatikan penyederhanaan data mentah yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data juga merupakan jenis analisis data di mana item yang tidak signifikan disederhanakan, dipersingkat, diperkuat, difokuskan, dan dibuang, dan data diatur sedemikian rupa sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan. (Sugiyono n.d.)

3.8.2 Penyajian Data

Ini adalah penyajian informasi yang terstruktur dan kemungkinan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Singkatnya, ini bisa menjadi cerita yang sistematis dan logis, membuat makna dan peristiwa lebih mudah dipahami. (Sugiyono n.d.)

3.8.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir, dimana data penelitian dapat diperoleh, dan dapat ditarik garis besar atau kesimpulan untuk mengetahui hasil penelitian secara keseluruhan. (Sugiyono n.d.)

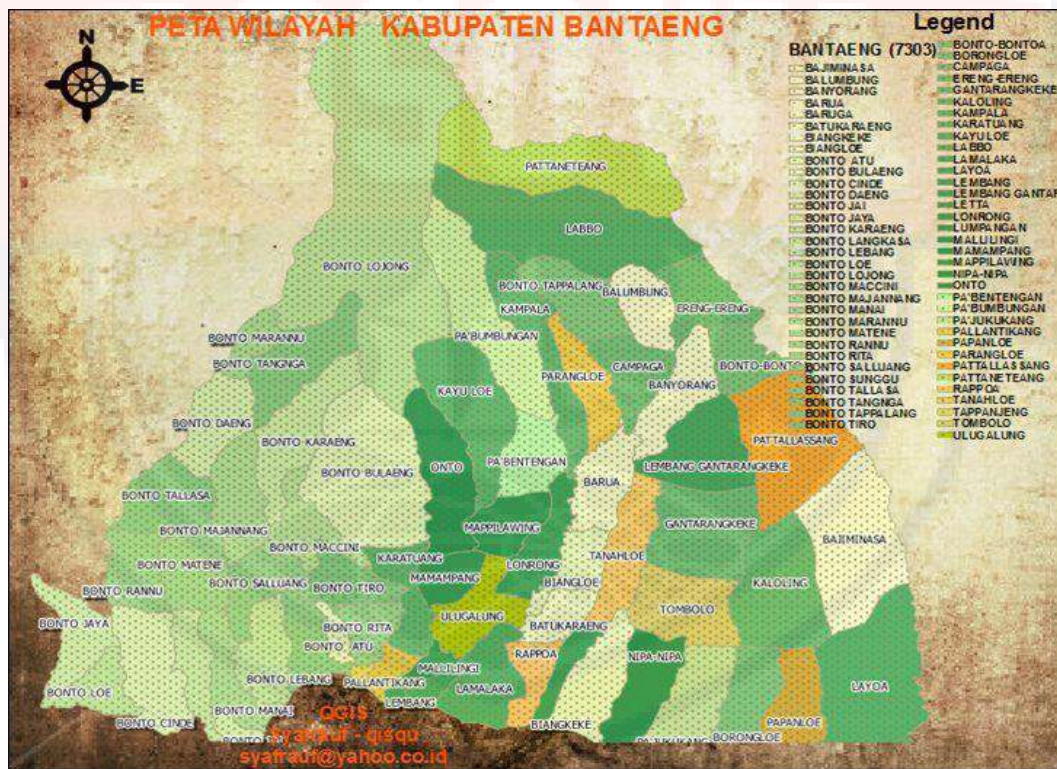
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah yang dijadikan penulis sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Bantaeng, di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng memiliki luas wilayah 395,83 kilometer persegi dan luas perairan 144 kilometer persegi, meliputi 8 kecamatan, 67 desa/Kelurahan, 502 Nama Rukun Warga (RW) dan 1.108 Rukun Tetangga

Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Bantaeng



Sumber Data: Bappeda 2018

Secara simbolik Kabupaten Bantaeng di kenal sebutan “Butta Toa” (tanah tua) barawal dari sebuah kerajaan “Bantayan”, pada Tahun 1252-1952,

yang juga dikenal dengan nama “Bonthain” (Hari jadi Bantaeng ditetapkan sejak Tahun 1254). Faktor geografis yang strategis, kerajaan “Bantayan” telah menjalin hubungan pemerintah dan perniagaan dengan Kerajaan Singosari dan Majapahit (*Negarakertagama, 1365*), Pembentukan wilayah Kabupaten Bantaeng sebagai bagian dari wilayah Sulawesi Selatan pada Tahun 1960, dan dipimpin oleh Bupati A. Rifai Bulu (sejak 1960-1965).

Kabupaten Bantaeng merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berharap dapat turut serta mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantaeng telah dirumuskan kebijakan yang meliputi visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, dan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut dirumuskan dalam beberapa tahapan, dengan tetap menjadikan data dan informasi pembangunan sebagai dasar pengambilan keputusan utama. Hal ini dilakukan karena data dan informasi yang relevan akan berkontribusi pada keakuratan pilihan kebijakan yang sesuai dengan identifikasi masalah pembangunan.

Data dan informasi pembangunan terangkum dalam gambaran umum wilayah Kabupaten Bantaeng, meliputi aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta daya saing daerah Sebagai bagian dari inisiatif pembangunan daerah, keempat karakteristik ini digambarkan sebagai penekanan daerah. Berikut ini adalah ikhtisar dari beberapa elemen kawasan untuk membantu Anda lebih memahami beragam potensi dan kinerjanya sejauh ini.

1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografis merupakan informasi spasial yang menjadi dasar untuk menganalisis gambaran umum keadaan di Kabupaten Bantaeng. Uraian geografis dalam dokumen perencanaan pembangunan akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana karakteristik Kabupaten Bantaeng berperan dalam pembangunan wilayah, termasuk wilayah dan batas-batas, letak geografis, topografi, dan penggunaan lahan dalam pembangunan wilayah. Lihat juga masing-masing hasil identifikasi potensi pembangunan dan daerah rawan bencana.

➤ Luas dan Batas wilayah administrasi

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi

Selatan yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gowa, Kabupaten Bulukumba.

Sebelah Timur : Kabupaten Bulukumba

Sebelah Selatan : Laut Flores

Sebelah Barat : Kabupaten Jeneponto

Curah hujan di Kabupaten Bantaeng relatif merata sepanjang tahun, dengan rata-rata 4,42 hari basah per bulan berdasarkan data tahun 2012, dengan jumlah hari hujan sebanyak 53 hari dalam setahun, sedangkan curah hujan dalam setahun adalah 169,33mm.

**Table 4 Luas Wilayah
Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2017**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (km²)	Persentase Luas Wilayah (%)
Bissappu	Bonto Lebang	32,84	8,30
Uluere	Bonto Marannu	67,29	17,00
Sinoa	Bonto Maccini	43,00	10,86
Bantaeng	Pallantikang	28,85	7,29
Eremerasa	Ulugalung	45,01	11,37
Tompobulu	Banyorang	76,99	19,45
Pajukukang	Nipa-nipa	48,90	12,35
Gantarangeke	Gantarangeke	52,95	13,38
Total		395,83	100,00

Sumber Data: Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2018

➤ **Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Bantaeng terletak 120kilometer sebelah selatan Kota Makassar, pusat Provinsi Sulawesi Selatan, pada 5°21'13"- 5°35'26" Lintang Selatan 119°51'42"-120° 05'27" Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di wilayah garis pantai yang membentang dari barat ke timur kota, salah satunya cocok untuk memancing. Wilayah daratan membentang dari garis pantai Flores hingga dataran tinggi di sekitar

Gunung Lompobattang yang memiliki ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dari segi kesejahteraan masyarakat, memberikan gambaran dan analisis tentang kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta seni, budaya, dan olahraga. Berikut rangkuman situasi kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantaeng.

a) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian suatu daerah tergantung pada sumber daya alam dan sektor produksinya. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu tidak terlepas dari perkembangan berbagai sektor yang berkontribusi terhadap nilai tambah perekonomian daerah yang bersangkutan. Kemampuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan dari kondisi ekonomi dalam kurun waktu tertentu.

b) Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial memberikan gambaran tentang Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan. Penekanan ini akan mengkaji seberapa jauh peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantaeng dalam kaitannya dengan indikator-indikator pembangunan yang penting bagi kesejahteraan sosial.

3. Aspek Pelayanan Umum

Segala jenis pelayanan, termasuk *Service Public* dan pelayanan publik yang menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut pelayanan publik. Bidang pelayanan ini terdiri dari pelayanan urusan yang dibutuhkan, pelayanan urusan pilihan, dan fungsi urusan pemerintahan sebagai focal point.

a) Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

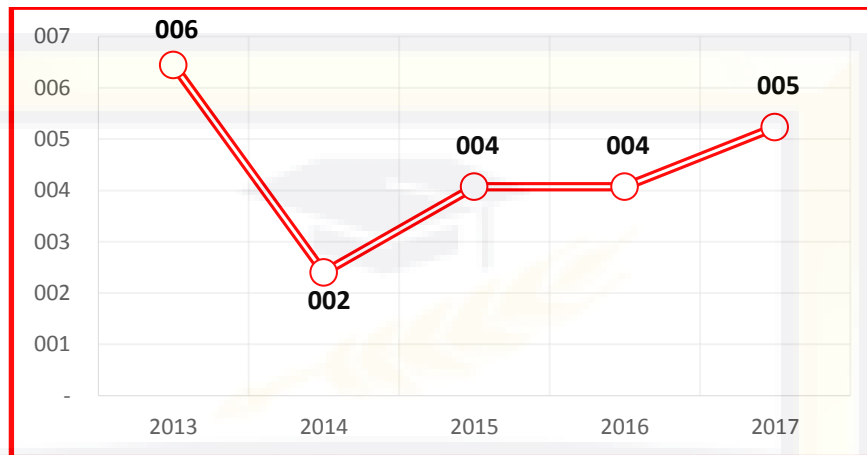
Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan bersama oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan harus mempunyai dua urusan dalam pembangunan daerah, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan dasar.

b) Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak memberikan pelayanan esensial merupakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, sekalipun tidak memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Bantaeng.

Gambar 4

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2017



Sumber Data: BPS tahun 2018

Dari tahun 2015 sampai dengan 2016, jumlah penduduk yang bekerja adalah 92.117, dimana 40.751 adalah perempuan dan 51.366 laki-laki, pada tahun 2017 meningkat 6.830 menjadi 98.947. Jumlah karyawan pada tahun 2018 dan 2016 adalah 98.947.

Table 5
Capaian Target dan Ketenagakerjaan Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk yang bekerja (orang)	80.732	91.623	92.117	92.117	98.947
2	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (orang)	-	-	-	480	156

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2018.

c) Layanan Urusan Pilihan

Pelayanan opsional sebenarnya merupakan pelayanan *dual government*, sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi unggulan Kabupaten Bantaeng yang ada, sangat memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d) Penunjang Urusan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dan seluruh unsur yang bersandar padanya memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Ketika pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan, masing-masing memiliki tanggung jawab dan fungsinya sendiri, dan pada akhirnya harus mempertimbangkan pencapaian teknis dan administratif.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu tujuan dibentuknya otonomi daerah berdasarkan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing merupakan salah satu unsur keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu tercapainya tingkat kesejahteraan yang berkelanjutan.

a. Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

c. Aspek Sumber Daya Manusia

4.2. Profil Kawasan Industri Bantaeng

4.2.1. Gambaran Umum Kawasan Industri Bantaeng

Sesuai dengan Arahana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng 2012-2032, khususnya dalam menyikapi pengidentifikasian kawasan industri besar, terletak di Kecamatan Pa'jukukang, yang sejalan dengan dinamika rencana. Wilayah tersebut membutuhkan lahan yang relatif besar yaitu 3.055 hektar, yang terdiri dari dua kecamatan, Pa'jukukang dan Gantarangeke.

Kawasan Industri Bantaeng terletak di Kecamatan Pa'jukukang dan Gantarangeke, dengan koordinat 120°01'08"BT-05°33'30"LS. Ini adalah wilayah vital yang dapat diakses melalui rute yang mencakup Administrasi Industri Bantaeng, khususnya:

1. Kecamatan Pa'jukukang
2. Desa Pa'jukukang
3. Desa Papan Loe
4. Desa Borong loe dan
5. Desa Baruga

4.2.2. Kondisi Fisik Dasar

a. Topografi

Kabupaten Bantaeng yang terletak di kaki Gunung Lompobattang memiliki medan yang meliputi lautan, daratan, dan pegunungan. Luas garis pantai adalah 59,33 km² atau sekitar 14,99 persen dengan kemiringan 0-2 meter, 168,75 km² atau 42,64 persen

dengan kemiringan 2-15 meter, dan 81,86 km² atau kurang lebih 20 meter. ,68% merupakan dataran dengan kemiringan 15-40 meter, sedangkan 83,80 km² (atau sekitar 21,17 persen) merupakan dataran dengan kemiringan lebih dari 40 meter.

b. Hidrologi

Kabupaten Bantaeng yang luasnya hanya sekitar 0,8 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan, hanya memiliki 11 sungai yang mengalir berbagai kecamatan. Jalur air yang dimaksud adalah:

Table 6 Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan yang Dilintasi Kabupaten Bantaeng Tahun 2017

Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Kecamatan yang Dilintasi
Pamosa	1,75	Pajukukang
Turung Asu	7,40	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Balang Sikuyu	10,80	Uluere, Sinoa, Bissappu
Panaikang	11,75	Uluere, Sinoa, Bissappu
Kalamassang	14,20	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Lemoa	14,45	Uluere, Bissappu
Kaloling	17,10	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Biangkeke	20,45	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Calendu	20,70	Uluere, Bantaeng
Bialo	43,30	Uluere, Tompobulu
Nipa-Nipa	25,15	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang

Sumber Data: RTRW Tahun 2018

4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari pengumpulan data diperoleh saat wawancara terkait dokumen data penelitian RDTR KIBA yang dituliskan oleh **Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002** bahwa Kebijakan Pembangunan merupakan rangkaian konsep pembangunan yang menjadi garis besar rencana dan dasar pelaksanaan kerja, kepemimpinan dan tata ruang organisasi. Pernyataan cita-cita, tujuan, asas adalah sebagai pedoman manajemen untuk mencapai suatu tujuan transformasi dengan berjalannya waktu yang ditandai dengan perubahan struktural, yaitu perubahan basis kegiatan ekonomi dan kerangka struktural ekonomi masyarakat juga dalam suatu kebijakan digunakan sebagai rangkaian rencana atau keputusan yang kemudian digunakan sebagai acuan, yang dinyatakan dalam bentuk rencana yang berkaitan dengan isu-isu tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode kualitatif, ditandai sebagai temuan penelitian ini, yang dirangkum melalui indikator yang diberikan pada bab sebelumnya, termasuk:

4.3.1. Pengembangan Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dalam Pemberdayaan Potensi Masyarakat Lokal di Kab. Bantaeng.

Menurut penelitian, pengembangan adalah salah satu tindakan untuk membangun kapasitas sumber daya manusia, dan merupakan kegiatan sistematis yang mengembangkan keterampilan konseptual, kemampuan pengambilan keputusan, dan hubungan interpersonal dengan memperluas pengetahuan untuk mencapai tujuan keseluruhan. Potensi lokal terkadang

diartikan sebagai kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah. Keadaan alam yang berbeda menghasilkan variasi, dan fitur potensi lokal masing-masing daerah berbeda-beda.

Kawasan Industri Bantaeng dalam Lengkong and Kawasan n.d. bahwa pengembangannya akan berimplikasi pada dinamika pembangunan di Kawasan sekitarnya, seperti peningkatan aktivitas ekonomi, perubahan guna lahan, kebutuhan tenaga kerja maupun dukungan sarana dan prasarana. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri 2019-2039:

1. Industri mencakup semua jenis kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan/atau menggunakan sumber daya industri untuk menciptakan komoditas yang memiliki nilai tambah atau keunggulan yang lebih besar, serta jasa industri..
- 2 Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Bantaeng Tahun 2019-2039 yang juga dikenal dengan RPIK Bantaeng 2019-2039 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten Bantaeng untuk tahun 2019 sampai dengan 2039;
- 3 Rencana Pengembangan Induk Industri Nasional, disingkat RIPIN, berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan entitas industri yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan industri..
- 4 Kawasan Peruntukan Industri adalah bagian dari lahan industri yang disisihkan untuk kegiatan industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
dan;

- 5 Kawasan Industri adalah kawasan terkonsentrasinya kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dibuat dan dipelihara oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Dari pemahaman diatas dapat dinyatakan bahwa Kawasan industri disuatu daerah tentunya pemerintah harus ada arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana keterkaitan pemerintah daerah mencapai tujuan untuk meningkatkan potensi lokal daerah dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Untuk kebijakan pembangunan Kabupaten Bantaeng disusun menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, serta acuan bagi *Stakeholders* kepentingan terkait dalam partisipasi aktif dalam pembangunan. Berikut diuraikan hasil penelitian terkait pengembangan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) dalam memberdayakan potensi masyarakat lokal di Kab. Bantaeng yang dinilai dari tiga indikator yaitu Kebijakan Pembanguna, Pemanfaatan Sumber Daya dan Budaya Masyarakat.

1 Kebijakan Pembangunan

Secara umum, tujuan arah kebijakan pembangunan adalah untuk merasionalkan pemilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan yang selaras dengan pengaturan pelaksanaan. Setiap tahun selama lima tahun

ke depan, akan ada konsentrasi pada topik atau penekanan tertentu untuk memenuhi visi, maksud, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang artinya adalah seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadikan daerahnya jauh lebih baik, jadi seorang pemimpin mampu berperan untuk menjadikan program-program harus tepat sasaran. (Sasaran et al. 2021)

Pada penjelasan diatas bahwa kebijakan tersebut ialah serangkaian keputusan yang membatasi atau memandu tindakan yang akan diambil. Pembuatan kebijakan pengembangan Kawasan Industri Bantaeng tentunya harus didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka menetapkan arah kebijakan pengembangan kawasan industri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Informan, salah satunya Bapak Amiruddin Nur yang merupakan Staf Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Beliau berprofesi sebagai Kepala Bidang Perekonomian sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, yang dimana beliau menjawab pertanyaan tentang Bagaimana kebijakan yang diterapkan dalam pembangunan Kawasan Industri Bantaeng, maka informan menjawab dengan mengatakan:

“Jadi intinya sekarang Kawasan KIBA itu menjadi awalnya kita untuk meningkatkan pembangunan baik dari tata ruang baru RDTR (rencana tata ruang kotanya) ataupun salah satu kebijakan yaitu kemudahan investasi, jadi investor itu dipermudah untuk masuk ke Kawasan ini, maka dari itu salah satu tujuan pemerintah dalam membangun Kawasan industri paling tidak peningkatan ekonomi masyarakat melalui masuknya investor contoh kecilnya itu masyarakat lokal sendiri

yang dipekerjakan di perusahaan tersebut itu pada intinya begitu” AN (10/6/2021).

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan dan studi literatur yang dikaji sesuai dengan Kebijakan RDTR maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa mengarah pada pengembangan kawasan industri sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu kebijakan Pemerintah yang mempermudah para investor untuk masuk dan Mengacu pada UU No.26/2007 tentang penataan ruang, khususnya Pasal 3 tujuan Penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, Produktiv, dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Tujuan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan, Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.

Kebijakan yang mendukung pertumbuhan daerah harus dikembangkan sebagai bagian dari perencanaan RDTR Kawasan Industri Bantaeng. Kebijakan ini antara lain membahas tiga hal:

1. *Aspek Strategis*; yaitu kebijaksanaan dasar pengembangan wilayah yang meliputi penentuan fungsi Kawasan Industri Bantaeng, pengembangan kegiatan dan pengembangan tata ruang Wilayah di Kawasan Industri Bantaeng tersebut. Ini merupakan penjabaran dan pengisian dari rencana tata ruang yang telah dikembangkan

sebelumnya serta inisiatif pembangunan daerah. Tujuan dan peran Kawasan Industri Bantaeng juga dapat ditentukan tergantung pada potensi dan keadaan kawasan;

2. *Aspek Teknis*; terutama strategi perencanaan mendasar Kawasan Industri Bantaeng yang bertujuan untuk penggunaan lahan yang efisien, fasilitas dan utilitas yang sesuai, mengoptimalkan pola transportasi, melestarikan keberlanjutan, dan mencapai kualitas lingkungan perumahan;
3. *Aspek Pengelolaan*; yaitu perencanaan Kawasan Industri Bantaeng yang telah mempertimbangkan aspek hukum dan klausul yang memungkinkan rencana tersebut dapat dilaksanakan, masalah koordinasi dalam persiapan/pelaksanaan, dan sumber pembiayaan untuk rencana tersebut. Hal ini tercermin dari keputusan Pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk mendirikan Kawasan Industri Bantaeng, pengembangan kegiatan dan pengembangan tata ruang Kawasan Industri Bantaeng tersebut

Dari penyusunan RDTR Kawasan industri bantaeng dalam hal ini Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengungkapkan bahwa dalam pengembangan Kawasan Industri Bantaeng:

“Disini juga ada kebijakan dari kami peraturan daerah yang terkait dengan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten bantaeng (RPIK), kenapa itu disusun karena industri besar itu dibangun seperti ini seperti diatas yah Kawasan pengolahan biji nikel itukan tambangnya tidak disini, tambangnya ada di Sulawesi tengah, Sulawesi tenggara disini hanya pengolahan saja”
SI (15/6/2021)

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan dan studi literatur yang dikaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa beberapa kebijakan Pemerintah Dinas Perindustrian Kabupaten Bantaeng sebagai arahan penyusunan RPIK (Rencana pembangunan industri Kabupaten Bantaeng), menyebutkan pengembangan Kawasan industri di kecamatan Pa'jukukang. Dengan hadirnya Peraturan Daerah RPIK 2019-2039 Nomor 6 Tahun 2019 sebagai acuan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam Proses pengembangan Kawasan Industri Bantaeng.

Untuk menentukan arah kebijakan pengembangan kawasan industri, kebijakan pengembangan Kawasan Industri Bantaeng tentunya harus didasarkan pada kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah:

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
2. Program peningkatan kesempatan kerja;
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program peningkatan Teknologi industri;
6. Program peningkatan struktur industry
7. Program dan upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan industri.

Rencana dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentunya harus dipimpin oleh kebijakan pemerintah dalam pengembangan kawasan industri, dengan pemerintah daerah dan pusat yang menentukan arah

pembangunan kawasan industri. Kutipan wawancara nara sumber tentang kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan industri:

“Kawasan industri itu sebenarnya harus di bangun oleh swasta bukan pemerintah, cuma Peraturan Daerah bisa mengintervensi tentang rencana pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan swasta, yang dilakukan Pemerintah Daerah cuma memberikan penguatan tentang regulasi, regulasi-regulasi data yang dibutuhkan untuk suatu pembangunan. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah tentang tata ruang wilayah kabupaten, na di RTRWnya itu ada detailnya disitu kalau mau membangun Kawasan industry yang bisa Cuma di player a misalnya di kec. A, nah itu *Backup*-nya pemerintah kabupaten bantaeng” AL (15/6/2021).

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan dan studi literatur yang dikaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, kebijakan pemerintah Dinas Sumber Daya Manusia dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng untuk mengembangkan kawasan industri di Kecamatan Pa'jukukang telah dilaksanakan sesuai rencana. Salah satu kebijakannya seperti meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) juga tertuang dalam RTRW Kabupaten Bantaeng Tahun 2011-2031 yaitu ‘Mewujudkan ruang wilayah yang aman, menyenangkan, produktif, dan berjangka panjang bagi Kabupaten Bantaeng melalui pengembangan Agropolitan dan Minapolitan berbasis pencegahan bencana’, melalui tujuan dan dari disusunnya RDTR Kawasan Industri Banataeng adalah: Mewujudkan Kawasan Industri Bantaeng yang produktif, Efisien, Berdaya saing dan berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.

Untuk menjalankan tugas dari program kebijakan-kebijakan yang harus tepat sasaran. Untuk arah kebijakan dijabarkan tahapannya sebagai berikut:

(1) Arah kebijakan pembangunan di tahun 2019 memiliki arti strategis karena kinerja yang ingin dicapai merupakan landasan atau penentu keberhasilan pokok bahasan tahap pembangunan selanjutnya. Hal tersebut menjadi landasan bagi penyesuaian kebijakan pembangunan jangka menengah 2019 di tahun 2019 (Akselerasi Pemerataan Pembangunan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat) Akselerasi pemerataan pembangunan menjadi satu kesatuan yang diarahkan mampu mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di Kabupaten Bantaeng yang semakin berkembang mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah strategis yang cepat untuk memperkuat perekonomian daerah melalui pembangunan yang berkeadilan.

(2) Arah kebijakan pada tahun 2020, pembangunan di Kabupaten Bantaeng berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2019. Pada tahun 2020 pembangunan Kabupaten Bantaeng mulai fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Pengembangan SDM yang Berkualitas sebagai Penggerak Pembangunan Daerah yang Tangguh dan Mandiri) fokus pembangunan daerah pada pengembangan kualitas SDM dan kesejahteraan sosial masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2020 ini

salah satu prioritas yang akan dilakukan adalah penyelesaian prioritas kebijakan.

- (3) Pada tahun 2021 ini pembangunan mengarah pada pembangunan infrastruktur dan pemerrintahan (Pemantapan Infrastruktur Daerah dan Birokrasi Yang Melayani) maka beberapa upaya yang akan dilakukan pada tahun ini adalah dengan pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah Kabupaten Bantaeng terutama infrastrukur pembangunan jalan dan aksesibiitas masyarakat.
- (4) Pada tahun 2022 pembangunan Kabupaten Bantaeng menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah yang lebih luas (Pengembangan Perekonomian Daerah Yang Pro Rakyat dan Pengembangan Agro Industri yang Berkelanjutan) pembangunan dilakukan dengan menitikberatkan pembangunan pada bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.
- (5) Pada tahun 2023 pembangunan Kabupaten Bantaeng menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah yang lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah yang lain (Penguatan Struktur Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing) maka pembangunan difokuskan pada pengembangan produk unggulan daerahdiharapkan lebih berkualitas dan inovatif.

Jika mengacu pada Arah Kebijakan, artinya untuk menindaklanjuti tahapan dan fokus pembangunan diatas, maka arah kebijakan tiap tahun yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

disajikan dalam keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bantaeng 2018-2023. Artinya apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Juga jelas dalam teori Agustino, kebijakan publik ialah rangkaian tindakan / kegiatan (peluang) yang diajukan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan hambatan (kesulitan) dan kemungkinan. Kebijakan tersebut diyakini dapat membantu mengatasi tantangan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan temuan analisis data terkait dengan kebijakan pembangunan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang sedang dalam proses pembangunan, baik dari segi ekonomi maupun industri. Di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng telah menerapkan berbagai strategi pengembangan kawasan industri secara bertahap.

2. Pemanfaatan Sumber Daya

Sumber daya merupakan komponen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari nilai potensial yang diberikan oleh aspek tertentu dalam kehidupan. Juga sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi, dan sebagai komponen ekosistem yang menghasilkan komoditas dan jasa yang sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dari suatu organisasi, institusi, atau perusahaan. Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dalam suatu organisasi sebagai promotor, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Pemahaman SDM diklasifikasikan menjadi dua jenis: pemahaman mikro dan pengetahuan makro. Individu yang bekerja dan menjadi bagian dari suatu perusahaan atau organisasi disebut sebagai sumber daya manusia secara mikro sebagai pegawai, buruh, pegawai, dan buruh buruh. Sementara itu, definisi makro sumber daya manusia adalah penduduk usia kerja suatu negara, termasuk mereka yang belum pernah bekerja dan mereka yang sudah bekerja.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci pada program pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng pada 2013-2017 merupakan capaian pembangunan Tahun 2018-2023 yang berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja pendidikan daerah dalam dokumen RPJMD diuraikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Data Pendidikan 2019-2023

No.	Aspek Fokus Bidang urusan indikator kinerja pembangunan daerah	Kondisi Kinerja Awal 2017-2018	Target Capaian Setia Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	63%	70	75	80	85	90	95
2	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	77%	80	85	90	92	97	100
3	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	39	42	45	50	60	65	70
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	109%	115	115	115	120	120	120
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	107%	98	100	100	100	100	100
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87%	90	90	92	95	97	97
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	83%	90	90	90	90	95	95
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	104%	100	100	100	100	100	100
9	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	93%	95	95	100	100	100	100
10	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	40%	45	50	60	65	70	75
11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1%	1	1	-	-	-	-
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	93%	100	100	100	100	100	100
13	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1%	1	-	-	-	-	-
14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	93%	100	100	100	100	100	100
15	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	94%	95	95	96	97	98	98

Sumber Data RDTR 2021

Maka dari itu sebagai penghubung suatu ilmu ataupun seni yang dapat mengatur hubungan antara pemerintah kepada masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam peranan tenaga kerja

disuatu perusahaan untuk menjalankan tugas secara efisien dan efektif. Jadi untuk sumber daya manusia yang menjadi suatu kebijakan perusahaan dengan cara-cara yang dipraktekkan dan berhubungan dengan pemberdayaan manusia atau aspek-aspek dari sumber daya manusia. Hal ini kemudian untuk memperlihatkan adanya saling pengertian antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal mempercayai, menghargai dan mendukung yang baik dari kedua pihak. Maka dari itu perusahaan berhubungan dengan pemberdayaan manusia atau aspek dari sumber daya manusia termasuk adanya kebijakan tentang memberdayakan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan industri.

Kembali lagi Narasumber Bapak Amiruddin Nur yang merupakan Staf Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), membahas terkait Sumber Daya Khususnya Sumber Daya Manusia yang dimana beliau mengatakan:

“Dengan adanya Kawasan Industri Bantaeng ini ada yang bisa kita tambahkan seperti tenaga kerja, BLK kita sudah ada jadi harapan kita itu dengan adanya KIBA, BLK jadi disitulah masyarakat-masyarakat yang dilatih untuk bisa masuk bekerja di Kawasan ini begitu sebenarnya. Jadi SDM untuk mendukung pengembangan KIBA itu juga salah satu supaya dapat berkembang dan juga Sebenarnya cikal bakalnya dari situ untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat” AN (10/6/2021).

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan dan studi literatur yang dikaji sesuai dengan Sumber Daya Manusia, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kawasan SDM itu salah

satu pendukung agar pengembangan Kawasan industri dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan di wilayah Kec. Pa'jukukang harus sesuai dengan rencana tata ruang kotanya juga sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar karena pembangunan Kawasan Industri itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat local dalam Kebijakan RPJPD 2015-2025 dan RPJMD Kab. Bantaeng Tahun 2018-2023 memiliki tujuan dan sasaran yaitu Memfasilitasi peningkatan kapasitas setiap warga Bantaeng agar mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan dan mampu secara bebas dan mandiri menyuarakan ide dan tujuan dalam segala aspek kehidupan, Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Terwujudnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Tujuan sasaran RPJMD Harapan lama BLK dan akhir periode 14,75.

Mencakup pembangunan SDM masyarakat Kabupaten Bantaeng. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang penting dalam pembangunan. Sebagai aset pembangunan diharapkan SDM memberikan dampak yang cukup signifikan dalam kemajuan daerah. Sehingga kualitas SDM sangat berkontribusi dalam percepatan pembangunan daerah. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa SDM sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang berpikir luas dan melihat tuntutan masa depan, yang memiliki sikap yang baik, berperilaku terhormat, dan

berwawasan luas, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan dalam berbagai disiplin ilmu dan unsur pertumbuhan.. Selain kemampuan akademis, kualitas sumber daya manusia juga perlu memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan menerapkan sikap berbudaya dan beragama, karena pada hakekatnya agama dan budaya menjadi satu kesatuan unsur norma-norma yang ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan SDM yang berkualitas diharapkan pembangunan di Kabupaten Bantaeng dapat lebih optimal.

Dengan usaha pengembangan Kawasan Industri tersebut maka sesuai dengan harapan pemerintah dengan adanya pembangunan KIBA maka akan membantu perekonomian masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang mengatakan bahwa Tujuan dibangunnya Kawasan Industri Bantaeng ini:

“Yah, untuk ini meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak ada lain jadi kuncinya itu untuk kesejahteraan rakyat, kita sebagai pemerintah Kab. Bantaeng mengharpkan kepada perusahaan agar menggunakan tenaga kerja lokal lebih besar bukan semuanya, lebih besar dibanding tenaga kerja yang dari luar, tenaga kerja lokal maksudnya orang bantaeng tentu harus lebih banyak dari pada jeneponto, bulukumba dll. Kita inikan bantaeng bagian dari Sulawesi selatan” SI (15/6/2021)

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan dan studi literatur yang dikaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengembangan potensi lokal bukan hanya untuk pendapatan asli daerah, akan tetapi juga tentunya untuk membantu Sumber Daya

Manusia melalui peningkatan perekonomiannya. Maka dari itu masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi dalam kehidupan masyarakat harus mendapatkan atau memahami informasi dalam kebijakan suatu instansi. Jadi untuk itu tugas dari seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan harapan dan keinginan masyarakatnya dengan menggunakan **Visi dan Misi** dengan baik yang tertuang bahwa upaya Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan mendorong pihak investor untuk memprioritaskan lapangan kerja untuk pekerja lokal daerah dengan pola kerjasama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Pembangunan daerah pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Salah satu indikasi kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan saat ini menjadi prioritas pembangunan nasional maupun daerah, Salah satu pendekatan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mempercepat upaya pengurangan kemiskinan dan meningkatkan peluang kerja. Salah satu manfaatnya adalah peningkatan jumlah kemungkinan pekerjaan yang tersedia. kebijakan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan Hal ini perlu dilakukan karena dengan perluasan kesempatan kerja diharapkan masyarakat akan lebih produktif bukan hanya perekonomian masyarakat yang meningkat namun juga akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Dengan

meningkatnya pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin sejahtera.

Bahkan jika mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang pembangunan industri sebagaimana di tuliskan untuk mencapai tujuan, dijelaskan bahwa pengembangan Kawasan industri berbasis sumber daya dan kearifan lokal itu bertujuan dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu Malayu P Hasibuan secara garis besar Sumber daya manusia memiliki bisnis atau layanan yang dapat dipasok dalam proses manufaktur berikutnya. Sumber daya manusia harus mencerminkan kualitas pekerjaan yang dilakukan seseorang pada periode tertentu untuk menghasilkan sesuatu..

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah-masalah yang terjadi dan dihadapi dalam kehidupan masyarakat harus mendapatkan atau memahami informasi dalam kebijakan suatu instansi. Jadi untuk itu tugas dari seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan harapan dan keinginan masyarakatnya.

b. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (SDA) terkait erat dengan keberadaan manusia di Bumi. Setiap tindakan memerlukan penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikumpulkan atau digunakan dari alam karena memiliki

nilai dan keunggulan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Untuk dapat memperoleh manfaat secara maksimal maka pengelolaan sumber daya alam juga bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi-fungsi sumber daya alam dan sebagai untuk keseimbangan lingkungan yang dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menanggapi isu-isu sumber daya alam yang dibahas, penulis berdasarkan tanggung jawab dan fungsi khusus masing-masing orang dalam pemanfaatan sumber daya alam, penulis merangkum pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa informan yang dapat menjawab indikator penelitian ini. Seperti yang dikatakan Amiruddin Nur selaku Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, infrastruktur dan Kewilayahan (BAPPEDA):

“Jadi Sumber Daya Alam itu sendiri dek, yang dimaksud Kelestariannya untuk mengelola sumberdaya alam secara lebih baik dengan memaksimalkan daya dukung dan daya lingkungan serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat, namun juga harus tetap berpegah teguh pada pelestarian lingkungan yang nantinya hasil-hasil alam akan di manfaatkan dan nantinya akan diolah juga dalam Kawasan ini” AN (10/6/2021).

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan dan studi literatur yang dikaji, maka penulis dapat menarik kesimpulan dalam

indikator yang menyebutkan bahwa Sumber Daya Alam memiliki banyak manfaat dan kegunaannya yang nanti saat di olah untuk salah satunya itu pengembangan Kawasan Industri. Juga tertuang dalam (Lia Widya Lis 2020) bahwa penelitian terdahulu tentang potensi lokal terutama Pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan sumber daya alam yang dapat ditangani dan dimanfaatkan seefisien mungkin dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Pembangunan sumber daya alam harus berada di bawah kendali dan pengelolaan pemerintah. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal harus fokus pada akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, untuk mengembangkan model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kerakyatan, diperlukan landasan kemandirian dan penguatan sistem dan kelembagaan ekonomi kerakyatan. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan adalah dengan memanfaatkan potensi kemandirian dan mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Beberapa penjelasan terkait Sumber Daya Alam dalam hal ini Staf Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menuturkan mengenai pengembangan Kawasan industri Bantaeng:

“Dengan sumber daya alam tentunya kami pastinya sudah merancang beberapa penyiapan-penyiapan yang masyarakat akan hasilkan baik dari pertaniannya, perikananannya, hasil lautnya, dan yang berhubungan dengan sumber daya alam itu tentunya akan di ekspor hasilnya dari di Kawasan ini sampai keluar Negri” AL (15/6/2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengungkapkan beberapa yang akan disiapkan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng sebagai pemanfaatan untuk memberdayakan potensi lokal melalui sumber daya alam seperti dalam penelitian terdahulu (Lia Widya Lis 2020) yang dituliskan bahwa salah satu pengembangan potensi lokal pertanian itu merujuk pada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan-pengelolaan hasil dari pertanian yang dibudidayakan untuk kemudian di olah pada perusahaan industri.

Dari pernyataan di atas, sudah selayaknya Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyiapkan beberapa bagian yang akan dibagi menjadi sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Oleh karena itu, sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat terus ada selama pemanfaatannya tidak dieksploitasi secara berlebihan, seperti air, sedangkan SDA yang tidak bisa diperbaharui yaitu kekayaan alam yang tidak mempunyai kemampuan memperbarui baik alami, maupun campur tangan manusia. Misalnya berbagai macam hasil tambang.

Kalau dilihat juga dari beberapa hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilakukan kepada pihak Dinas Perindustrian terkait Sumber daya alam bagaimana hasil dari alam daerah akan diolah lalu di perjual belikan, dari pertanyaan itu beberapa

memberikan jawaban yang hampir serupa, dengan mengatakan dalam pengelolaan sumber daya alam itu mesti ada kebijakan dari pemerintah bahwasanya pembangunan Kawasan industri ini akan menjadikan hasil alam masyarakat yang dapat diolah akan di masukkan ke Kawasan ini untuk diolah Kembali dan di jual belikan sampai keluar negeri

Jadi Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian serta pengelola Kawasan industri dalam pengembangan Kawasan industri tentunya harus juga memperhatikan hasil-hasil alam dari daerahnya sendiri sehingga, proses pengembangan Kawasan industri ini dapat terus memberdayakan masyarakat lokalnya sendiri. Berikut wawancara dengan Tony M Pahlevi selaku Direktur Utama PT Perseroda terkait pengelolaan sumber daya alam dalam pengembangan Kawasan Industri:

“Terkait sumber daya alamnya itu kebijakan dari pemerintah yang mengatakan pembangunan Kawasan ini untuk meningkatkan Potensi lokal Kab. Bantaeng, jadi itu benar, itu betul Kawasan Industri itu dibentuk oleh pemerintah untuk memusatkan industry-industri, baik industri ringan maupun industri sedang, dan industri berat” TMP (26/6/2021)

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan dan studi literatur yang dikaji sesuai dengan Pengelolaan SDA maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan sumber daya alam berupaya menjamin yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Bantaeng bahwa terpeliharanya fungsi sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan dalam rangka mendukung prakarsa

pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang saat ini sedang berkembang dari segi ekonomi dan industri. Industri Bantaeng sedang dalam tahap awal pertumbuhan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dan PT Perseroda Kabupaten Bantaeng telah melakukan berbagai tahapan pembangunan kawasan industri dalam pembangunan Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang, semakin berkembang Kawasan Industri di Kecamatan Pa'jukukang.

Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan dengan menumbuhkan dan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (*agroindustry*) yang berbasis lingkungan. Serta dalam meningkatnya industri yang mengolah sumber daya alam lokal, khususnya hasil pertanian itu harus berwawasan lingkungan. Dalam pengembangan SDA saat ini yang dikembangkan di Kab. Bantaeng meliputi Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang merupakan salah satu pendukung yang cukup krusial dalam pembangunan daerah. Perekonomian Kabupaten Bantaeng cukup mempunyai pergerakan yang baik, hal ini terlihat dengan adanya pembangunan infrastruktur ekonomi bagi masyarakat kecil. Kemudian kontribusi produk unggulan daerah juga memberikan sumbangsih dalam pendapatan daerah. Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

b) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata, keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator LPE sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terkait sumber daya alam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Bantaeng yang kaya akan hasil alam dan dapat dimanfaatkan baik ringan, industry sedang dan industry berat yang dimana pemanfaat hasil dari pertanian-pertanian, perikanan masyarakat akan dikelola melalui Kawasan industri ini dan diperjual belikan melalui Pengeksporan.

3. Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat merupakan salah satu budaya masyarakat yang mengacu pada seluruh koleksi informasi, Keyakinan, seni, moral, hukum, konvensi, dan kapasitas serta kebiasaan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

Adapun budaya masyarakat yang harus ditetapkan dalam sebuah pembangunan yang dimana salah satu budaya lokal ataupun kearifan yang dapat berbentuk Warisan budaya Indonesia telah berkembang sejak lama. Budaya yang lahir dari keyakinan kuat masyarakat terhadap alam dan

pandangan serta nilai lingkungan. Tentu saja, nilai, konvensi, dan sistem kepercayaan harus dilestarikan dari segi budaya lokal.

Dalam wawancara yang dilakukan di Kantor PT Perseroda oleh Ansar selaku Manager Operational yang mengatakan:

“Menetapkan budaya dalam pembangunan Kawasan Industri itu dek sangat penting, karena tujuan dari pemerintah yang memuat regulasi tentang potensi lokal itu yah salah satunya pasti harus menetapkan budaya lokal yang mana kita tidak boleh egois dalam membangun, kita lihat juga ini Peta KIBA nanti didalamnya ada Kawasan rumah masyarakat, ada rumah sakit, ada sekolah, hotel dll. Jadi kita juga mementingkan masyarakatnya sendiri” AR (26/6/2021)

Adapun hasil analisis wawancara yang dimaksud ialah jika pembangunan dilakukan di kabupaten Bantaeng seperti Kawasan industri, pariwisata dan pembangunan lainnya itu harus ada regulasi yang menyatakan bahwa pembangunan-pembangunan yang dilakukan harus untuk memberdayakan masyarakatnya. Jadi pihak pengelola PT Perseroda harus betul-betul memberikan *feedback*-nya terhadap masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Selain itu, Amiruddin Nur membernarkan bahwa memang pembangunan Kawasan industri itu tidak lepas dari memberdayakan Potensi lokal salah satunya kita tetap menganut budaya sendiri.

“Jadi waktu itu kita ada juga dikatakan dalam regulasi pemerintah, terkait yang dibahas dengan bagaimana pemanfaatan itu diadakan dengan maksud harus mensejahterakan rakyat atas kesadaran yang berlandaskan nilai-nilai agama juga” AN (10/6/2021).

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan yang dikaji sesuai dengan Kebudayaan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa

budaya yang dimaksud adalah mewujudkan sumber daya manusia yang masih memegang kepercayaan budaya lokal dengan cara mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tertuang juga dalam PERDA RPIK 2019-2039 Tentang Kearifan lokal yang tumbuh di Masyarakat bahwa kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat serta sumber daya alam yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih memegang adat dan tradisi budaya serta memiliki kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat, hal ini merupakan potensi yang kuat untuk mengembangkan industri berbasis kearifan lokal.

Gambar 5

Keterkaitan Antara Budaya Lokal



Sumber Data: Bappeda tahun 2018

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bantaeng. Terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera yang berorientasi fisik dan psikis pada pertumbuhan, keadilan, keberlanjutan, dan keunggulan berdasarkan agama dan budaya lokal:

1. Sejahtera Lahir Batin adalah kondisi dimana sektor-sektor perekonomian memiliki produksi dan produktivitas masyarakat berkeunggulan dan berdaya saing yang tinggi dalam menghadapi dinamika perubahan sehingga dapat mendorong perbaikan pendapatan dan kemampuan masyarakat untuk peningkatan taraf hidupnya.
2. Orientasi pada Kemajuan, yakni peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi masyarakat dan Kesehatan yang dibingkai oleh pelayanan publik yang optimal.
3. Orientasi pada Keadilan yakni menjunjung tinggi kesetaraan bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM, mengayomi seluruh lapisan masyarakat agar memiliki posisi dan jarak yang sama dalam mengakses sumber-sumber ekonomi dan mendorong kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.
4. Menjunjung tinggi orientasi kelestarian dimaksudkan untuk mengelola sumberdaya alam secara lebih baik dengan memaksimalkan daya dukung dan daya samping lingkungan serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat namun tetap berpegang teguh pada pelestarian lingkungan.

5. Adapun Keunggulan berbasis Agama dan Budaya Lokal adalah kondisi dimana keunggulan yang dimiliki adalah keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya manusia, sumber daya kebudayaan dan sumber daya alam secara lebih baik dan melipat gandakan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang dibangun atas kesadaran yang berlandaskan nilai-nilai agama dan kearifan lokal budaya Masyarakat Butta Toa Bantaeng.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa di setiap daerah mempunyai perbedaan khusus yang terdapat di lingkungan masing-masing. Jadi sangat berkaitan erat jika masyarakat yang ada di daerah tersebut memiliki sudut pandang tersendiri terhadap lingkungan dan alamnya. Untuk masyarakat yang ada disana khususnya pemerintah daerah wajib mengembangkan cara-caranya tersendiri untuk supaya bagaimana masyarakat disana tetap memelihara keseimbangan alam dan lingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menghasilkan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kebijakan pengembangan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini dapat memberdayakan potensi masyarakat lokal di Kab. Bantaeng yaitu, secara keseluruhan sepenuhnya sudah berjalan dengan maksimal karena pembangunan Kawasan Industri ini sudah berjalan kurang lebih Empat Tahun. Juga Kebijakan Pemerintah dalam hal memberdayakan

masyarakat itu sudah berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, untuk itu Tindakan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat juga sesama instansi harus terarah untuk dapat melaksanakan Visi dan Misi secara maksimal. Kenyataan sampai saat ini sebgaiian masyarakat yang bekerja di dalam Kawasan tersebut itu sudah merasakan dampaknya dari setelah adanya pembangunan Kawasan industri di Kabupaten Bantaeng.

4.3.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Dengan Adanya Pembangunan Kawasan Industri di Kab. Bantaeng.

Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Bantaeng dalam beberapa Tahun sebelum dibangunnya Kawasan industri di Bantaeng tingkat penghasilan masyarakat belum dapat dilihat dari sisi perkembangannya, namun dengan adanya pembangunan KIBA maka terlihat adanya peningkatan kegiatan ekonomi dilingkungan tersebut.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh, maka dengan ini peneliti dapat beranggapan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terukur dari kebijakan yang telah diterapkan pemerintah yang dapat diselesaikan dengan baik. Berikut pernyataan hasil wawancara yang telah dilakukan Bersama masyarakat Kabupataen Bantaeng;

1. Pemenuhan Kebutuhan

Menurut teori yang dikemukakan oleh Maslow tentang kebutuhan, yang beberapa kebutuhan harus lebih diutamakan dari kebutuhan lainnya. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan yang dapat disebut benar-benar

kebutuhan masuk dari pada seperti pemenuhan kebutuhan seperti air, makan, itulah yang dapat disebut sebagai bentuk tingkat kebutuhan.

Dikemukakan peneliti bahwa Salah satu hal yang dibutuhkan manusia atau masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidup alamiahnya dan mencapai kesejahteraan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat berupa barang atau jasa, atau dapat berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat di Kabupaten Bantaeng menyatakan bahwa jenis pekerjaan yang paling menyenangkan sebenarnya adalah pekerjaan yang paling menguntungkan bagi individu, sehingga pasti sangat subjektif sifatnya.

Manfaat dari pekerjaan yang sangat menyenangkan ini didasarkan pada perbandingan hasil yang diperoleh dengan energi yang telah dikonsumsi. Secara umum, mereka yang menganggap bekerja sebagai pegawai merupakan realisasi ekonomi dapat disebut pekerjaan yang sulit karena mereka bekerja di kawasan industri dan hasil panen dari pabrik akan diolah nantinya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat penghasilan yang diperoleh dari bekerja sebagai karyawan di Kawasan Industri itu lumayan bisa dinikmati. Seperti yang dikatakan oleh salah satu Karyawan PT Huadi Alloy sekaligus masyarakat Kab. Bantaeng yang bernama Bapak Umar, ia mengatakan:

“Jadi saya bekerja disini itu kurang lebih sudah 2 Tahun dek, kalau dibilang kebutuhan saya terpenuhi selama saya masuk dan bekerja di dalam itu bisa dikatakan iya terpenuhi, karena setiap bulan itu saya kasih istri uang kalau sudah gaji untuk belanja kebutuhan sehari-hari juga kan” MU (12/6/2021).

Kemudian pertanyaan yang sama ditujukan kepada Bapak Samsuri selaku Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menyatakan:

“Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sudah pasti jelas, karna setiap anggota masyarakat Kab. Bantaeng yang dipekerjakan disana itu tidak lainji itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sendiri, jadi bisa dikatakan masyarakat yang bekerja disana itu sudah pasti kebutuhannya terpenuhi” SI (15/6/2021).

Berdasarkan analisis wawancara dengan informan dan studi literatur yang dikaji sesuai dengan Pemenuhan Kebutuhan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, Pemerintah Kabupaten Bantaeng sudah menjalankan visi dan misi yang mereka buat berjalan dengan sebaik-baiknya. Karena visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Bantaeng sudah memenuhi sebagian dari peningkatan Potensi Lokal. Dalam PERDA RPIK 2019-2039 Tentang Ketersediaan Tenaga Komponen dituliskan bahwa Dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015, kawasan ASEAN telah memiliki pasar tenaga kerja bebas, yang meningkatkan persaingan antara pekerja internasional dan pekerja rumah tangga sebagai akibat dari mobilitas tenaga terampil yang lebih bebas. Akibatnya, penciptaan tenaga kerja industri berbasis kompetensi merupakan persyaratan penting yang dipenuhi melalui pendidikan kejuruan, pendidikan dan pelatihan, dan pemagangan. Kabupaten Bantaeng akan mempunyai balai latihan kerja serta sekolah komunitas, yang diharapkan akan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten Jadi masyarakat kabupaten bantaeng tidak perlu khawatir karena sebagian pembangunan-pembangunan khususnya Kawasan Industri itu di peruntukkan untuk

Peningkatan Potensi Lokal khususnya Sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, terkait pemenuhan kebutuhan khususnya masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data tentunya sangat berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena dari hasil kerja masyarakat sebagai karyawan di Kawasan Industri Bantaeng itu sudah cukup memenuhi Sebagian kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan Misi Pemerintah Bupati yang menjabarkan tentang meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja adalah upaya pemerintah supaya dalam memberdayakan masyarakat miskin dan mendorong pihak investor untuk memprioritaskan lapangan kerja untuk pekerja lokal daerah dengan pola Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pembangunan daerah pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Salah satu indikasi kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan saat ini menjadi prioritas pembangunan nasional maupun daerah, salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Peningkatan perluasan lapangan kerja ini menjadi salah satu kebijakan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini perlu dilakukan karena dengan perluasan kesempatan kerja diharapkan masyarakat akan lebih produktif bukan hanya perekonomian masyarakat

yang meningkat namun juga akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Terdapat kesimpulan bahwa beberapa tugas pemerintah yang mengacu pada visi dan misi yang dituliskan untuk Memberdayakan Masyarakat Lokal, jadi sudah dapat dikatakan terpenuhi. Ketika masyarakatnya sendiri sudah merasakan dampak dari pada dibangunnya Kawasan industri diwilayahnya sendiri, karena secara pemikiran bahwa kebutuhan masyarakat sangatlah penting maka dari itu dengan diperkerjakannya masyarakat lokal maka secara tidak langsung dari hasil pendapatan Gaji karyawan sudah bisa disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagian besar sudah terpenuhi.

2. Peningkatan Pendapatan Karyawan

Dalam hal ini pendapatan pegawai merupakan suatu permintaan dan keinginan tanpa batasan kuantitatif, tetapi permintaan dan keinginan tersebut harus dibatasi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh seseorang. Penghasilan yang diperoleh masyarakat harus berbeda-beda, jenis pekerjaan yang berbeda alasannya. Perbedaan pekerjaan ini tentu saja didorong oleh tingkat pendidikan. Keterampilan dan pengalaman di tempat kerja. Indikator dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat itu salah satunya diukur melalui pendapatan yang diterimanya.

Peningkatan kesempatan kerja tersebut dapat dilihat dari geliat ekonomi yang ada di wilayah KIBA dibandingkan sebelumnya. Tentunya dengan adanya KIBA akan menggerakkan ekonomi yang ada disekitarnya

atau melahirkan *multiplier effect*, misalnya bukan hanya Industri namun munculnya kegiatan ekonomi baru disekitar wilayah tersebut. tentunya hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat maka diharapkan masyarakat akan semakin sejahtera

Ketika karyawan PT Yatai Kawasan Industri Bantaeng sekaligus Masyarakat Kec. Pa'jukukang saya wawancarai tentang pendapatan selama bekerja di PT Yatai ini, ia pun mengatakan:

“ia jadi kalau pendapatan saya selama bekerja disini itu lumayanji, karena pendatan disini itu Alhamdulillah UMR dan setiap Tahun itu bertambah sesuai lamanya pekerja, seperti setahun atau dua tahun beda-beda kenaikan gajinya pertahun” NS (12/6/2021).

Kemudian ia melanjutkan pernyataannya;

“Jadi dari selama saya bekerja juga disini, awal masuk itu hanya naik angkot tapi sekarang alhamdulillah saya sudah bisa beli motor sendiri dari hasil pendapatan saya bekerja di PT in, sangat besar dampak bagi kami warga yang bekerja disini” (12/6/2021).

Dari hasil analisis wawancara Bersama informan berdasarkan studi literatur maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan masyarakat selama bekerja di Kawasan Industri dalam hasil wawancara diatas masyarakat Kabupaten sangat senang terhadap kebijakan dan tujuan pemerintah yang lebih mengedepankan masyarakatnya dengan mewujudkan pembangunan-pembangunan yang bisa memperkerjakan atau memberdayakan masyarakatnya sendiri.

Kemudian Tony M Pahlevi mengutarakan pendapatnya selaku Direktur Utama PT Perseroda yang menyatakan:

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat iya itu wajib karena sangat berpengaruh terdapat pendapatannya jadi peningkatan angkatan kerja dan tenaga kerja. Jadi dilihat dari setiap kawasan industri yang berpotensi berkembang dan maju itu difasilitasi oleh pemerintah jadi dia punya tenaga-tenaga hotel, industri, non faktor dll. Jadi bantaeng itu Tahun 2019 pertumbuhan ekonominya nomor 4 seluruh Indonesia” TMP (26/6/2021).

Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pencapaian tujuan pemerintah yang menuliskan bahwa dengan adanya pembangunan di daerah itu diperuntukkan untuk masyarakat, tidak bisa di pungkiri bahwa permasalahan yang ada pada setiap individu maupun keluarga adalah masalah kemiskinan. Jadi data dari BPS (2013) menunjukkan bahwa 11,4 persen penduduk berada pada garis kemiskinan nasional. Kemiskinan yang terus menduduki negara ini bahkan sampai di daerah pedesaan mencapai 14,3 persen dari penduduk desa dan 8,4 persen dari penduduk kota dibawah garis kemiskinan. Meskipun dalam jumlah masyarakat yang miskin terus berkurang, namun secara keseluruhan pembagian pendapatan pun semakin meluas

Lanjut wawancara Kembali Bersama masyarakat yang bekerja di PT Huadi Alloy oleh Ibu Nur Fitri Rosita dengan pertanyaan yang sama ia pun menjawab:

“Kalau pendapatan saya selama bekerja disini sudah cukup terpenuhi karena saya sendiri dan teman-teman yang dari awalnya ngontrak sekarang sudah bisa cicil rumah diperumahan ini dan bahkan sudah ada yang beli tanah, karena memang sejak berdirinya PT ini warga Bantaeng sangat amat merasakan dampaknya begitu eh” FR (12/6/2021).

Jadi di waktu yang bersamaan, Ismail selaku *Security* Huadi Nickel Alloy ditanyai mengenai pendapatan, ia mengatakan bahwa memang

selama karyawan saya liat yang bekerja disini itu pendapatannya cukup lumayan baik. Berdasarkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa Rata-rata Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah kondisi awal 75,05 (Kurang Baik), Tahun 2019 (76.70) Baik, Tahun 2020 (77.53) Baik, Tahun 2021 (78.36) Baik, Tahun 2022 (79.18) Baik, Tahun 2023 (80.01) Baik, Kondisi Akhir (80.01) Baik.

Menurut ilmu ekonomi, pendapatan adalah keseluruhan hasil yang diperoleh dari sektor formal dan informal dalam jangka waktu tertentu. Mengukur pendapatan masyarakat tidaklah mudah, sehingga BPS menggunakan pengeluaran/konsumsi masyarakat untuk menghitung pendapatan. Hal ini didasarkan pada paradigma bahwa ketika pendapatan meningkat, maka berbagai tuntutan yang semakin menuntut juga datang, sehingga diperlukan pengeluaran yang tinggi pula. BPS (2011)

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terkait pendapatan masyarakat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan yang diterima seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu itu sudah dapat dikatakan masuk dalam kategori kebutuhan terenuhi secara langsung dan program pemerintah sudah berjalan dengan baik sampai saat ini.

Hasil dari keseluruhan penelitian ini berdasarkan hasil peningkatan perekonomian dan pendapatan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri di Kab. Bantaeng, yaitu pemerintah sudah dapat menangani kendala-kendala masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian baik dari sisi pendapatan maupun penghasilan dari masyarakatnya sendiri. Untuk selanjutnya tantangan yang pemerintah hadapi dalam mensejahterakan rakyatnya itu lebih besar, jadi masyarakat juga harus lebih terbuka agar dapat memaksimalkan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam hal pembangunan Kawasan industri jangka Panjang yang di perkirakan sampai 2023.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengkaji hasil wawancara dengan informasi dan studi literatur maka terkait mengenai Evaluasi Kebijakan Pembangunan KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) Dalam Meningkatkan Potensi Lokal Kab. Bantaeng.

1. Pemberdayaan Potensi Lokal yang menggunakan indikator 1) Kebijakan pembangunan dan indikator ke 2) Pemanfaatan Sumber Daya dengan sub indikator a) Sumber daya Manusia b) Sumber daya alam, serta indikator ke 3) Budaya Masyarakat dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kebijakan pengembangan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini dapat memberdayakan potensi masyarakat lokal di Kab. Bantaeng yaitu, secara keseluruhan sepenuhnya sudah berjalan dengan maksimal karena pembangunan Kawasan Industri ini sudah berjalan kurang lebih Empat Tahun. Juga Kebijakan Pemerintah dalam hal memberdayakan masyarakat itu sudah berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, untuk itu Tindakan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat juga sesama instansi harus terarah untuk dapat melaksanakan Visi dan Misi secara maksimal. Kenyataan sampai saat ini sebgaiian masyarakat yang bekerja di dalam Kawasan tersebut itu sudah merasakan dampaknya dari setelah adanya pembangunan Kawasan industri di Kabupaten Bantaeng.

2. Kondisi Ekonomi Masyarakat dengan menggunakan indikator 1) Pemenuhan Kebutuhan serta indikator ke 2) Peningkatan Pendapatan Karyawan dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri di Kab. Bantaeng, yaitu pemerintah sudah dapat menangani kendala-kendala masyarakat dalam hal peningkatan perekonomian baik dari sisi pendapatan maupun penghasilan dari masyarakatnya sendiri. Untuk selanjutnya tantangan yang pemerintah hadapi dalam mensejahterakan rakyatnya itu lebih besar, jadi masyarakat juga harus lebih terbuka agar dapat memaksimalkan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam hal pembangunan Kawasan industri jangka Panjang yang di perkirakan sampai 2023.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan sejumlah permasalahan dan kendala-kendala yang ditemukan dilapangan, maka dari itu peneliti memberikan saran sebagai berikut;

1. Jadi untuk pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng harus diperhatikan dengan baik agar dapat terselesaikan dengan waktu yang diperkirakan guna dalam meningkatkan Potensi Lokal Kab. Bantaeng. Dan juga program-program pemerintah untuk mendorong Kabupaten sebagai kota yang maju harus tersusun secara baik dan benar.

2. Pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu melakukan sedikit pembaharuan terhadap pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan di Kab. Bantaeng agar seluruh masyarakat disana harus mendapatkan peluang untuk bekerja dan mendapatkan hasil yang baik demi kebutuhan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal & Artikel Ilmiah

- A.Fajar Ferdiansyah et al. 2019. "Studi Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng Di Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng." *Skripsi*: 5.
- Abdal. 2015. *KEBIJAKAN PUBLIK (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. <http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf>.
- Abidin, Said Zainal. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur Siwah.
- Adri, Patton. 2005. *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa Di Daerah Perbatasan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.
- . 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Alam, Syamsul. 2020. "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (Bantaeng Industrial Park) DI KABUPATEN BANTAENG." *Skripsi*: 10.
- Boby. 2021. "Daftar Perusahaan BUMN Persero Dan Tbk Di Indonesia." *lifepal*. <https://lifepal.co.id/media/daftar-perusahaan-bumn/> (January 25, 2021).
- David Korten. 1993. *Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela Dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2006. "Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah."
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Hal Utama Dalam Pembangunan*,. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Harun, Rochajat& Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan Dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartono, Kartini. 1990. *Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maru.
- Lengkong, Chriesty E, and Direktorat Penataan Kawasan. "Penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang Di Sekitar Kawasan Industri Bantaeng (KIBA)."
- Lester, James P. Dan Joseph Steward. 2000. *Public Policy. An Evaluation Approach*. Wadsworth: Belmont, CA.

- Lia Widya Lis. 2020. "Pengembangan Potensi Lokal Pertanian Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat." *Human Relations* 3(1): 1–8. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.globus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa.
- Marbun, B. N. 2007. *Kamus Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Pustaka Sinar.
- Miles, M.B, Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA: Sage Publications: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori Dan Penerapannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, Siti. 2017. "Pengaruh Citra Merek, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Samsung Di Yogyakarta." *JBMA – Vol. IV, No. 2, September 2017 ISSN : 2252-5483* IV(2): 60–69.
- Pahmi. 2010. *Perspektif Baru Antropologi Pedesaan*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Perroux, F. 1970. "Economic Space: Theory and Applications." *Quarterly Journal of Economics*.
- Sasaran, Tujuan D A N et al. 2021. "Bab 5 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 5.1." : 1–28.
- Soetomo. 2014. *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soleh, Ahmad. 2017. "Strategi Pengembangan Potensi Desa." *Jurnal Sungkai* 5(1): 35–52.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. 147th ed. R&D.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thomas R Dye. 2016. "TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK."
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Todaro, Michael P. 2002. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

“Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, Pasal 14.” 2014.

Wiwandari. 2014. “Karakteristik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Potensi Lokal Pada Wilayah Peri-Urban WPU.” *Geografi Media Informasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian* 11: 2.

Wollman. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. new york: Taylor & Francis Group.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelola Kawasan Industri Bantaeng

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri.

Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Peraturan Daerah RPIK 2019-2039 Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri 2019-2039

Internet dan Lainnya

Safitri, DianMega. “Sonara”. 2020. <https://www.sonora.id/read/422215439/kembangkan-kiba-bantaeng-bakal-jadi-pusat-ekonomi-baru-sulsel?page=2>



Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

I. Judul Skripsi:

Evaluasi Kebijakan Pembangunan KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) dalam Meningkatkan Potensi Lokal Kab. Bantaeng.

II. Rumusan Masalah

1. Apakah Pengembangan Pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini dapat Memberdayakan Potensi Masyarakat Lokal di Kab. Bantaeng?
2. Bagaimana Kondisi Ekonomi Masyarakat dengan adanya Pembangunan Kawasan Industri di Kab. Bantaeng?

III. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengembangan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng dalam Memberdayakan Potensi Masyarakat Lokal.
2. Untuk Mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri.

IV. Fokus Penelitian

1. Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri dalam memberdayakan Potensi Masyarakat Lokal Kab. Bantaeng.
2. Tingkat Perekonomian masyarakat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri Kab. Bantaeng.

V. Informan Penelitian

1. Badan Pemerintahan:
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian = 2 Orang
2. Perusahaan:
PT Bantaeng Sinergi Cemerlang (PT PERSERODA) = 2 Orang
3. Masyarakat
Karyawan Kawasan Industri = 3 Orang

TABEL MATRIKS UNTUK PENGEMBANGAN PENELITIAN

No	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian	Sumber Informan	Teknik pengumpulan data
1.	Apakah Kebijakan pengembangan pembangunan Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) ini dapat memberdayakan potensi masyarakat lokal di Kab. Bantaeng?	Pembangunan Kawasan industri dalam memberdayakan Potensi masyarakat Lokal Kabupaten Bantaeng.	a. Kebijakan Pembangunan b. Sumber Daya c. Budaya Masyarakat	1. Kepala Bidang Perekonomian Sumber daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Sekertaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. 3. Direktur dan Manager PT Perseroda	1. Observasi 2. Interview 3. Dokumen
2.	Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri di Kab. Bantaeng?	Tingkat Perekonomian masyarakat dengan adanya pembangunan Kawasan Industri.	a. Pemenuhan Kebutuhan b. Peningkatan Pendapatan Karyawan	1. Direktur PT Perseroda 2. Masyarakat.	1. Observasi 2. Interview 3. Dokumen

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Konsep	Pertanyaan
Konsep Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Pandangan Anda terkait Kawasan Industri? 2. Bagaimana Kebijakan Yang diterapkan Oleh Pemerintah dalam Membangun KIBA? 3. Bagaimana Hubungan Kerja sama Antara Pemerintah dan Pengelola KIBA? 4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan? 5. Bagaimana Persiapan Yang dilakukan Pemerintah kedepannya terhadap KIBA? 6. Bagaimana tahapan Penyusunan rencana pembangunan KIBA? 7. Apakah dibangunnya Kawasan Industri ini untuk Mensejahterakan Masyarakat?
Konsep Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemanfaatan sumber daya yang di gunakan dalam KIBA ini? 2. Bagaimana cara pemerintah meningkatkan sumber daya melalui pembangunan KIBA? 3. Apakah sumber daya sangat penting dalam pembangunan ini? 4. Apakah Sumber daya itu termasuk manusia yang turut dalam pengembangan KIBA ini?
Konsep Pemenuhan Kebutuhan & Pendapatan Karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda rasakan setelah bekerja di KIBA ini? 2. Apakah manfaat pembangunan Kawasan industri sudah memenuhi kebutuhan anda? 3. Apa yang anda harapkan dari pembangunan industri ini? 4. Apakah dari sisi ekonomi tingkat pendapatan anda berubah?

Lampiran 3 Panduan Observasi

PANDUAN OBSERVASI

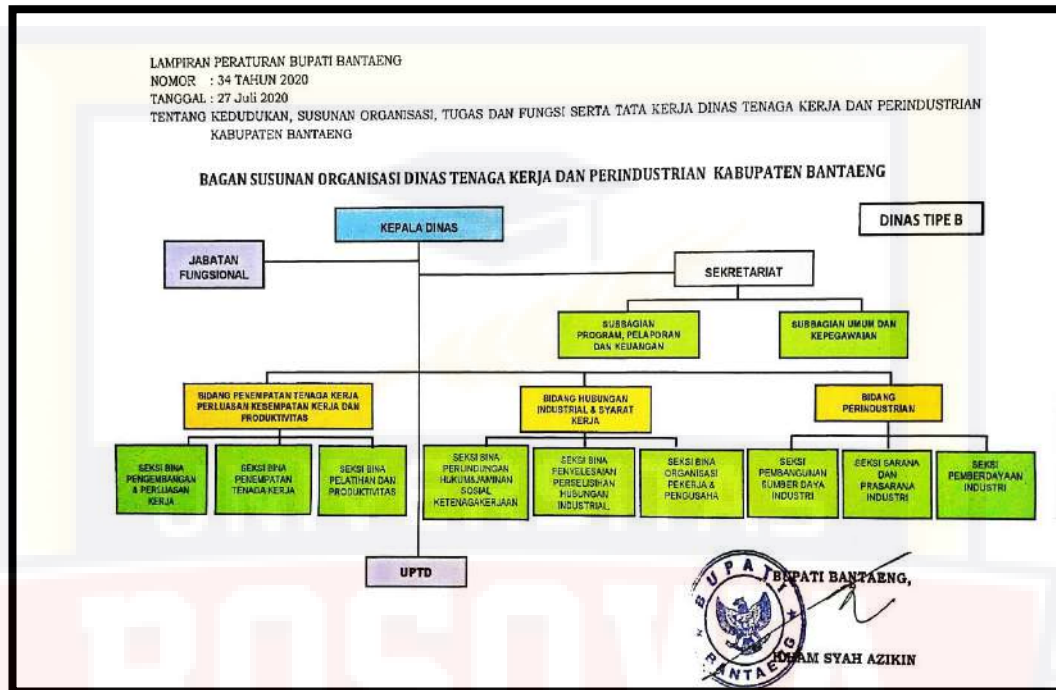
1. Observasi Umum Lokasi Penelitian
 - a. Profil Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan
 - b. Visi dan Misi Kabupaten Bantaeng
 - c. Lokasi dan Letak Geografis Kabupaten Bantaeng
 - d. Struktru Organisasi Kabupaten Bantaeng
2. Pemberdayaan Potensi Lokal
 - a. Kebijakan Pembangunan
 - b. Sumber Daya
 - c. Budaya Masyarakat
3. Kondisi Ekonomi Masyarakat
 - a. Pemenuhan Kebutuhan
 - b. Peningkatan Pendapatan Karyawan

Lampiran 4 Daftar Nama Informan

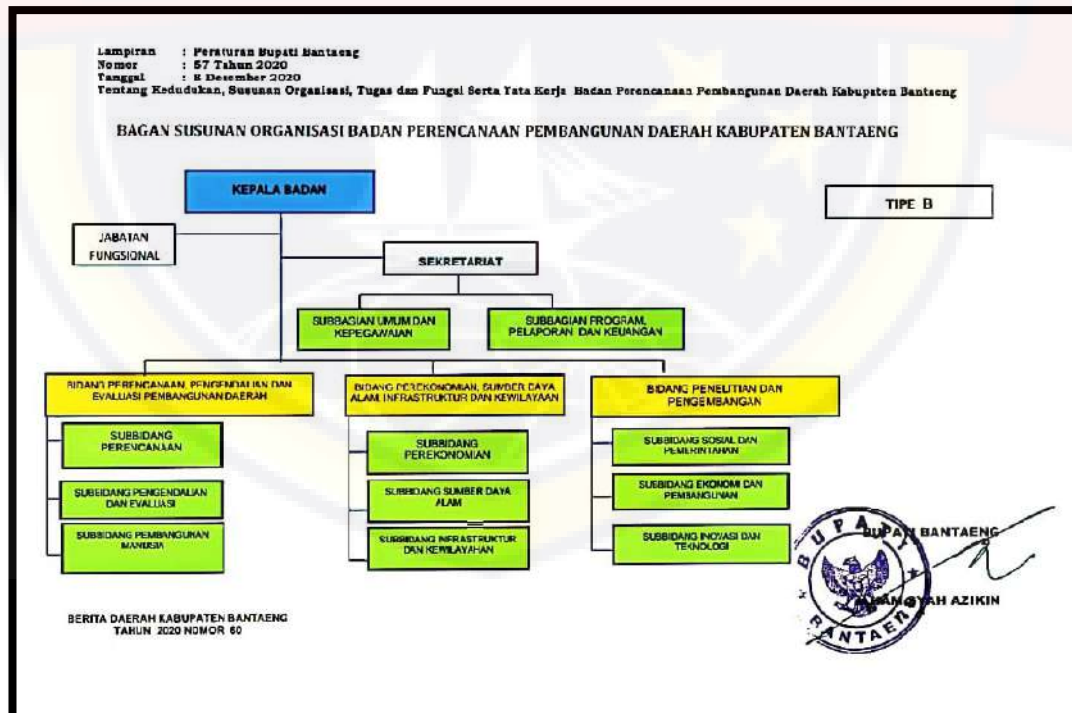
NO	Nama	Inisial	Pekerjaan/Bidang
1.	Samsuri S.sos	SI	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
2.	Andi Lukman	AL	Staf Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
3.	Amiruddin Nur, ST, MM.	AN	Kepala Bidang Perekonomian Sumber daya alam, infrastruktur, Kewilayahan (BAPPEDA).
4.	Tony M Pahlevi	TMP	Direktur PT Bantaeng Sinergi Cemerlang.
5.	Ansar SE	AN	Manager Operational PT Bantaeng Sinergi Cemerlang.
6.	Muhammad Umar	MU	Karyawan PT Huadi Alloy
7.	Nawir Syah	NS	Karyawan PT Yatai
8.	Nur Fitri Rosita	NFR	Karyawan PT Huadi Alloy

Lampiran 5 Struktur Organisasi


1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian




2. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian Dari Kampus

	UNIVERSITAS BOSOWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568 Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id
Nomor	: A.134/FSP/UNIBOS/V/2021
Lampiran	: 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal	: <u>Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi</u>
Kepada Yth, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	
Di- Kota Makassar	
Dengan hormat, Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :	
Nama	: Genya
NIM	: 45 17 021 017
Judul penelitian	: Evaluasi Kebijakan Pembangunan KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) Oleh PT Kima (Persero) dalam Meningkatkan Potensi Lokal Kabupaten Bantaeng.
Tempat	: Kantor BAPPEDA dan Kantor Dinas Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
Waktu	: Juni- Juli 2021
Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.	
Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
Makassar, 25 Mei 2021 Dekan Fisip Unibos,  Arief Wicaksono, S.Ip, M.A Nidn : 09271107602	
Tembusan : 1. Arsip	

Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 1 1 9 3 0 0 5 5 0 4

Nomor : 15086/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Bupati Bantaeng

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar Nomor : A.134/FSP/UNIBOSN/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : GENYA
Nomor Pokok : 4517021017
Program Studi : Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar


Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" **EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KIBA (KAWASAN INDUSTRI BANTAENG) OLEH PT KIMA (PERSERO) DALAM MENINGKATKAN POTENSI LOKAL KAB. BANTAENG** "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juni s/d 31 Juli 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,
Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 27 Mei 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmplsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmplsp.bantaengkab.go.id	
IZIN PENELITIAN NOMOR : 503/129/IPL/DPM-PTSP/VI/2021	
DASAR HUKUM :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;4. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan.	
MEMBERIKAN IZIN KEPADA	
Nama	: GENYA
Jenis Kelamin	: Perempuan
N I M	: 4517021017
No. KTP	: 7371094306990008
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Bosowa
Alamat	: Jl. Kesadaran III Kec. Panakukang Kota Makassar
Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul : "Evaluasi Kebijakan Pembangunan KIBA (Kawasan Industri Bantaeng) Oleh PT Kima (Persero) dalam Meningkatkan Potensi Lokal Kabupaten Bantaeng"	
Lokasi Penelitian	: Kabupaten Bantaeng
Lama Penelitian	: 10 Juni 2021 s.d. 31 Juli 2021
Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat Daerah setempat;4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.	
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng Pada tanggal : 10 Juni 2021 a.n. BUPATI BANTAENG PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,	
 1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 0 0 1 4 0	
	
 H. SYAMSUL SULI, S.E., M.M. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19620907 199003 1 011	

**Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantaeng**

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Andi Manappiang Bantaeng Kode Pos : 92412 Email : bappedabantaeng@yahoo.co.id Website : www.bantaengkab.co.id</p>
<p><u>SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN</u> Nomor : 050.2/ 43 /BAPPEDA/VI/2021</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: AMIRUDDIN NUR,ST,MM.
NIP	: 19740112 200212 1 006
Pangkat/gol	: Pembina / IV.a
Jabatan	: Kepala Bidang,Perekonomian, ,Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
<p>Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas:</p>	
Nama	: GENYA
NIM	: 4517021017
Fakultas	: Ilmu Politik
Program studi	: Ilmu Administrasi Negara
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa
<p>Telah melakukan penelitian di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng pada tanggal 10 sampai 21 Juni 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KIBA (KAWASAN INDUSTRI BANTAENG) DALAM MENINGKATKAN POTENSI LOKAL KAB.BANTAENG",</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini di buat dan di berikan kepada yang bersangkutan dan di pergunakan seperlunya.</p>	
<p>Bantaeng, 21 Juni 2021 A.n KEPALA BAPPEDA Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan</p>	
<p> AMIRUDDIN NUR, ST, MM Pangkat: Pembina /IV.a NIP: 19740112 200212 1 006</p>	
<p><u>Tembusan, disampaikan kepada Yth :</u></p>	
<ol style="list-style-type: none">1. Bapak Bupati Bantaeng (sebagai laporan);2. Rektor Universitas Bosowa Makassar di Makassar;3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Bantaeng;4. Pertinggal,-----	

Lampiran 10 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng

	PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN Jl. A. MANNAPPIANG No. 05 Bantaeng Telp. (0413) 21202 Fax (0413) 22091
SURAT KETERANGAN Nomor: 560/352/D.Naker&Ind/VI/2021	
Berdasarkan surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng Nomor: 503/129/IPL/DPM-PTSP/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Izin Penelitian, atas nama :	
Nama	: GENYA
Jenis Kelamin	: Perempuan
N I M	: 4517021017
No. KTP	: 7371094306990008
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Bosowa
Alamat	: Jl. Kesadaran III Kec. Panakukang Kota Makassar
Telah Melakukan Penelitian mulai tanggal 15 s.d 29 Juni 2021 di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.	
Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Bantaeng, 29 Juni 2021  A. IRYANDI LANGGARA, AP Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19740619 199412 1 001	

Lampiran 11 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kantor PT Bantaeng Sinergi Cemerlang (PT PERSERODA)

 **PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG (PERSERODA)**
PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI BANTAENG
BASIC Jl. Gagak No. 8 Kel. Pallantikang Kabupaten Bantaeng Kode Pos 92411 Nomor Telpn (Hlp) 085299626376
Email : bantaengsinergicemerlang@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor. 020/BASIC/VII/2021

Yang berandatangan dibawah ini :

Nama : Tony M. Pahlevi
Jabatan : Direktur Utama

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Genya
NIM : 4517021017
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa (S1)

 Telah melakukan penelitian di kantor PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda)/Pengelola Kawasan Industri Bantaeng, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KIBA KAWASAN INDUSTRI BANTAENG DALAM MENINGKATKAN POTENSI LOKAL KAB. BANTAENG"

 Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantaeng, 5 Juli 2021
PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang (Perseroda)


Tony M. Pahlevi
Direktur Utama
BANTAENG SINERGI CEMERLANG

Lampiran 12 Dokumen Wawancara dengan Informan

1. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda)



Wawancara dengan Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



Wawancara dengan Sekertaris dan Staf Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

3. Kantor PT Bantaeng Sinergi Cemerlang (PT PERSERODA)



Wawancara dengan Direktur Utama dan Manager Operasional PT Bantaeng Sinergi Cemerlang (PT Perseroda)

4. Masyarakat (Karyawan Kawasan Industri Bantaeng.



Wawancara dengan Masyarakat Kab. Bantaeng sekaligus Karyawan